



**DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**



INDEKS
PEMBANGUNAN
MANUSIA
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
2017

ANGKA HARAPAN HIDUP
HARAPAN LAMA SEKOLAH
RATA-RATA LAMA
SEKOLAH
DAYA BELI



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

KATA PENGANTAR

Publikasi “**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017**” ini merupakan bagian dari upaya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una dalam rangka mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dengan merepresentasikan ke dalam suatu besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tahun 2017 menggunakan metode baru dalam penghitungannya sehingga diharapkan dapat lebih memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan rakyat dan indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Berhasilnya penerbitan publikasi ini karena dukungan serta kerjasama yang baik dari semua pihak yang turut membantu. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak terkait atas bantuan dan peran sertanya dalam penerbitan publikasi ini. Akhir kata, untuk perbaikan di masa yang akan datang, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Ampana, November 2017

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tojo Una-Una**

ARIFIN E. UKO, S.ST,M.Eng
NIP. 19630513 198603 1 024

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	3
1.3. Sumber Data	4
BAB II METODOLOGI	6
2.1. Dimensi IPM	8
2.2. Tahap Penghitungan IPM	17
2.3. Kategori Peringkat Pembangunan Manusia	20
BAB III TINJAUAN UMUM	21
3.1. Geografis	21
3.2. Kependudukan	23
3.3. Pendidikan	27
3.4. Kesehatan	43
3.5. Ekonomi	50
BAB IV PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TOJO UNA-UNA	53
4.1. Komponen IPM	53
4.2. IPM Kabupaten Tojo Una-Una	65
4.3. Pertumbuhan IPM Kabupaten Tojo Una-Una	69

4.4.	IPM Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017	70
BAB V	PENUTUP	74
5.1.	Kesimpulan	74
5.2.	Saran	75
LAMPIRAN		79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	7
Tabel 2.2. Pengelompokan Jenjang Pendidikan dalam Penghitungan IPM	11
Tabel 2.3. Konversi Ijazah menurut Jenis Pendidikan dalam Penghitungan IPM	12
Tabel 2.4. Konversi Tahun Lama Sekolah menurut Ijazah Terakhir	13
Tabel 2.5. Lama Sekolah menurut Jenjang Pendidikan	13
Tabel 3.1. Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una menurut Kecamatan, 2016	24
Tabel 3.2. <i>Dependency Ratio</i> Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2015	27
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016	40
Tabel 3.4. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 25 Tahun Keatas menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016	42
Tabel 3.5. Persentase Lamanya Sakit Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una, 2016 (Hari)	47
Tabel 3.6. PDRB menurut Lapangan Usaha dan Persentase Perkembangan Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tojo Una-Una, 2014-2016	51
Tabel 4.1. Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016	70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 3.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una (km ²), 2016	22
Gambar 3.2	Piramida Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una, 2016	25
Gambar 3.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016	31
Gambar 3.4	Perbandingan APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016	33
Gambar 3.5	APM Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Tojo Una-Una, 2016	34
Gambar 3.6	APS Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Tojo Una-Una, 2016	35
Gambar 3.7	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (tahun) di Kabupaten Tojo Una-Una, 2012-2016	38
Gambar 3.8	Hubungan Antara Program Gizi dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	45
Gambar 3.9	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016	46
Gambar 3.10	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Tojo Una-Una, 2010 – 2016	49
Gambar 4.1	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una, 2012-2016	56
Gambar 4.2	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016	57

Gambar 4.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016	58
Gambar 4.4	Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016	59
Gambar 4.5	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tojo Una-Una, 2012-2016	60
Gambar 4.6	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016	61
Gambar 4.7	Perkembangan Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Tojo Una-Una, 2012-2016	64
Gambar 4.8	Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016	65
Gambar 4.9	Perkembangan IPM Kabupaten Tojo Una-Una, 2012-2016	66
Gambar 4.10	IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016	68
Gambar 4.11	IPM dan Indikator Penyusunnya di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016-2017	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016	80
Lampiran 2 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016	81
Lampiran 3 Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016	82
Lampiran 4 Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016	83
Lampiran 5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016	84
Lampiran 6 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016	85
Lampiran 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016	86
Lampiran 8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator Penyusun IPM Kabupaten Tojo Una-Una, 2013-2017	87



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Manusia (*human development*) selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik oleh berbagai kalangan, terutama sekali sejak *United Nations Development Programme* (UNDP) mulai memperkenalkannya pada tahun 1990. Hal tersebut disebabkan karena paradigma pembangunan yang dianut sebagian besar negara-negara di dunia selama ini yang menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan kearah paradigma baru, yaitu pembangunan yang menitikberatkan kepada usaha untuk meningkatkan kualitas manusia dan memberikan peluang yang lebih luas pada penduduk untuk berpartisipasi dalam proses penetapan kebijakan pembangunan. Pembangunan manusia juga mengingatkan kita bahwa “pembangunan” yang dimaksud adalah pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya dalam pendapatan yang lebih tinggi. Banyak negara, seperti sejumlah negara penghasil minyak yang berpendapatan tinggi, disebut sebagai negara yang mengalami “pertumbuhan tanpa pembangunan” (todaro, 2004,70).

Paradigma pembangunan manusia mengandung 4 (empat) komponen utama :

➤ **Produktivitas**

Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam mencari

penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.

➤ **Pemerataan**

Masyarakat harus memiliki akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapat manfaat dari kesempatan ini.

➤ **Berkelanjutan**

Akses untuk memperoleh kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan (fisik, manusia, lingkungan hidup) harus dilengkapi.

➤ **Pemberdayaan**

Masyarakat diharapkan berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses-proses yang memengaruhi kehidupan mereka.

Dari perspektif UNDP pembangunan manusia dilihat sebagai upaya sistematis dan terencana untuk membangun kemampuan manusia. UNDP memformulasikan bahwa pembangunan manusia adalah usaha peningkatan produktivitas (*productivity*), pemberdayaan (*empowerment*) penduduk secara merata (*evenly*) dan berkesinambungan (*sustainable*) melalui investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya, penciptaan peluang kerja melalui pertumbuhan ekonomi, dan memberikan peluang luas pada penduduk untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Untuk memberikan gambaran tentang pencapaian pembangunan manusia oleh sebuah negara atau wilayah, UNDP telah memperkenalkan suatu indikator yang dinamakan *Human Development*

Index (HDI) dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dapat menggambarkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia menurut tiga dimensi yang sangat mendasar. Alat ukur ini telah digunakan baik pada tingkat nasional maupun internasional dalam melihat hasil-hasil pembangunan masing-masing provinsi atau negara. Selanjutnya alat ukur ini diperluas kegunaannya pada tingkat yang lebih rendah yaitu pada level kabupaten/kota. IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun berdasarkan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*) dan Standar hidup layak (*decent standard of living*). (BPS, 1999).

Pada tahun 2011, UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru, kemudian pada tahun 2015 dilakukan penyempurnaan (IPM Metode Baru). Untuk memperoleh gambaran tentang pembangunan manusia di Kabupaten Tojo Una-Una, maka disusunlah publikasi “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017”, yang diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penentuan kebijakan pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una.

1.2. TUJUAN PENULISAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 disusun dalam kerangka untuk menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan, dengan bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga diharapkan daerah

mempunyai indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian pembangunan, terutama yang terkait erat dengan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur Panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), dan Standar hidup layak (*decent standart of living*).

Manfaat atau kegunaan data IPM adalah sebagai berikut:

- ✓ IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- ✓ IPM dijadikan sebagai salah satu indikator target pembangunan pemerintah
- ✓ IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
- ✓ IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara

1.3. SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tojo Una-Una adalah data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan sampel tambahan agar lebih mampu merepresentasikan besarnya IPM di Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil Susenas merupakan data pokok dalam perhitungan indeks

pembangunan manusia, sedangkan data selain itu yang digunakan sebagai data pendukung adalah proyeksi penduduk dan data penunjang lainnya. Sejak tahun 1993, data Susenas menjadi alat untuk mengkaji dan memantau hasil pembangunan dibidang sosial dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan manusia hingga tingkat kabupaten/ kota. Variabel-variabel yang terdapat dalam survei tersebut adalah kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, fertilitas dan keluarga berencana serta konsumsi/pengeluaran rumah tangga sebulan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung antara pengumpul data (pencacah) dengan responden. Hasil pencacahan tersebut diperiksa oleh tim pemeriksa lapangan dan selanjutnya diserahkan ke tim pengolahan data untuk dientri menggunakan media komputer.



METODOLOGI

Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah sering menuntut adanya ukuran baku dengan menyusun indeks agregat yang memungkinkan diturunkannya satu angka yang merangkum berbagai dimensi masalah yang sedang menjadi topik bahasan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat yang telah dicapai adalah dengan menggunakan indikator komposit.

Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang dapat dijadikan salah satu ukuran untuk melihat tingkat pencapaian pembangunan manusia secara keseluruhan. IPM sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah untuk mengetahui kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Langkah yang ditempuh untuk menghadapi perkembangan fenomena yang sifatnya kuantitatif, dimulai dengan memahami konsep dan definisi serta batasan baku masalah yang hendak diukur. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga dimensi yang dianggap sangat mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*).

IPM dihitung sebagai rata-rata aritmatik dari Indeks Kesehatan (Harapan Hidup e_0), Indeks Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah), dan Indeks Standar Hidup Layak (Indeks Pengeluaran). Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM, dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Tabel 2.1.

Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator Komponen IPM (X_i)	Nilai (th)		Keterangan
	Maksimum	Minimum	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup (AHH)	85	20	Sesuai Standar Global (UNDP)
Harapan Lama Sekolah (HLS)	18	0	Sesuai Standar Global (UNDP)
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	15	0	Sesuai Standar Global (UNDP)
Konsumsi Per kapita yang Disesuaikan (Pendekatan Terhadap Daya Beli)	107.721 (PPP U\$) 26.572.352 (Rp)*	100 (PPP U\$) 1.007.436 (Rp)**	UNDP Menggunakan PDB Per kapita Riil yang Disesuaikan

Ket : *)Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025
 **)Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2011 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam penulisan ini, indeks tersebut dinyatakan dalam angka ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS dan UNDP tahun 1996. Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan.

2.1. Dimensi IPM

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long life and healthy life*)

Pembangunan manusia harus lebih mengupayakan agar penduduk dapat mencapai “umur” yang panjang dan hidup sehat. Terdapat banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi ini tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, UNDP memilih indikator angka harapan hidup saat lahir (*life expectancy at birth*) yang biasa dinotasikan dengan e_0 . AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir, sehingga AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Indeks Kesehatan, dihitung berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) sejak seseorang dilahirkan dengan mempertimbangkan angka harapan hidup terendah dan tertinggi (UNDP).

Secara matematik dapat ditulis sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - 20}{85 - 20} \times 100$$

Keterangan :

AHH : Angka Harapan Hidup

20 : nilai terendah

85 : nilai tertinggi

Angka Harapan Hidup (AHH) dapat diperoleh melalui suatu paket program Mortpack (metode Trussel dengan model West), dengan menginput data hasil Susenas yaitu rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup (ALH) dan rata-rata jumlah anak yang masih hidup (AMH) per wanita yang berumur 15-49 tahun. Rumus untuk memperoleh rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*children ever born*), adalah sebagai berikut:

$$R_{alh} = \frac{\sum_{i=1}^7 Alh_i}{\sum_{i=1}^7 w_i}$$

Keterangan :

R_{alh} : rata-rata anak lahir hidup

Alh : anak lahir hidup menurut kelompok umur ibu ke-i

w : wanita menurut kelompok umur ke-i

i : kelompok umur 15-19; 20-24; 25-29;30-34; 35- 39;40-44; 45-49

Rumus untuk memperoleh rata-rata anak yang masih hidup (*children surviving*), adalah sebagai berikut:

$$R_{amh} = \frac{\sum_{i=1}^7 amh_i}{\sum_{i=1}^7 w_i}$$

Keterangan :

R_{amh} : rata-rata anak yang masih hidup

- Amh : anak yang masih hidup menurut kelompok umur ibu ke-i
w_i : wanita menurut kelompok umur ke-i
i : kelompok umur

Angka Harapan Hidup (AHH) dianggap sebagai resultan dari berbagai indikator kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, dan pemenuhan gizi ibu & bayi.

Pengetahuan (*Knowledge*)

Selain umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan juga diakui secara luas sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Dengan pertimbangan ketersediaan data, pengetahuan diukur dengan dua indikator, yaitu angka Rata-rata Lama Sekolah/RLS (*Mean Years of Schooling-MYS*) dan angka Harapan Lama Sekolah/HLS (*Expected Years of Schooling-EYS*). Angka Melek Huruf (AMH) tidak lagi digunakan dalam penghitungan IPM. AMH dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan. Disamping itu, AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Oleh karenanya, AMH diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS

dihitung dengan mengikuti standar internasional yang digunakan UNDP. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun keatas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir dan dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Perhitungan RLS pada usia 25 tahun keatas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Teknik Menghitung RLS :

- Seleksi Penduduk pada umur 15 tahun keatas
- Mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki

Tabel 2.2.

Pengelompokan Jenjang Pendidikan dalam Penghitungan IPM

Jenis Pendidikan	Pendidikan
(1)	(2)
SD/SDLB	Sekolah Dasar
Madrasah Ibtidaiyah	
Paket A	
SMTPLB/SMTPLB	SMTP
Madrasah Tsanawiyah	
Paket B	
SMTALB/SMTALB	SMTA
Madrasah Aliyah	
SMK	
Paket C	D1/D2
Program D1/D2	
Program D3/Sarjana Muda	D3
Program D4/S1	S1
Program S2/S3	S2/S3

- Mengelompokkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki

Tabel 2.3.

Konversi Ijazah menurut Jenis Pendidikan dalam Penghitungan IPM

Jenis Pendidikan	Ijazah
(1)	(2)
Tidak Punya Ijazah SD	Tidak Punya Ijazah SD
SD/SDLB	Sekolah Dasar
Madrasah Ibtidaiyah	
Paket A	
SMTPLB/SMTPLB	SMTPLB
Madrasah Tsanawiyah	
Paket B	
SMTALB/SMTALB	SMTA
Madrasah Aliyah	
SMK	
Paket C	
Program D1/D2	D1/D2
Program D3/Sarjana Muda	D3
Program D4/S1	S1
Program D4/S1	S1
Program S2/S3	S2/S3

- Mengkonversi tahun lama sekolah menurut ijazah terakhir

Tabel 2.4.

Konversi Tahun Lama Sekolah menurut Ijazah Terakhir

Jenis Pendidikan	Konversi Tahun Lama Sekolah (th)
(1)	(2)
Tidak Punya Ijazah SD	0
Sekolah Dasar	6
SMTp	9
SMTA	12
D1/D2	14
D3	15
S1/D4	16
S2/S3	18

- Menghitung lamanya bersekolah sampai kelas terakhir.
- Menghitung lamanya bersekolah

Tabel 2.5.

Lama Sekolah menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	Lama Sekolah (th)
(1)	(2)
Tidak Punya Ijazah SD	0
Masih Sekolah di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Masih Sekolah S2/S3	<u>Konversi ijazah terakhir + 1</u> *Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2=6 dan kuliah S3=7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak sekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

Sumber data Rata-rata Lama Sekolah didapatkan dari Survei sosial ekonomi (Susenas KOR) yang dilakukan oleh BPS.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di Pesantren (sumber data pesantren yaitu Direktorat Pendidikan Islam).

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan :

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun ke-t

E_i^t : Jumlah penduduk usaiyang bersekolah pada tahun ke-t

- P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t
 i : Usia ($a, a+1, \dots, n$)
 FK : Faktor koreksi pesantren

Faktor koreksi pesantren diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio santri mukim} = \frac{\text{Jumlah santri bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

$$\begin{aligned} &\text{Jumlah santri sekolah dan mukim} \\ &= \text{rasio santri mukim} \times \text{jumlah santri sekolah} \end{aligned}$$

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Teknik menghitung HLS :

- ✓ Menghitung Jumlah Penduduk menurut umur (7 tahun keatas)
- ✓ Menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun keatas)
- ✓ Menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur
- ✓ Menghitung harapan lama sekolah

2. Standar Hidup Layak (*Decent Standard of Living*)

Standar hidup layak merupakan unsur dasar pembangunan yang diakui secara luas, selain umur panjang & hidup sehat dan pengetahuan. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional, UNDP memilih PNB (Produk Nasional Bruto) per kapita. Data PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga

diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan data Susenas. Penentuan nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2013=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP) dilakukan sesuai rumus berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Dimana:

- p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j
- p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan
- m : jumlah komoditas

Rata-rata pengeluaran per kapita konstan kemudian disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing PowerParity-PPP*). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Rumus untuk menentukan nilai dari Rata-rata pengeluaran yang disesuaikan adalah:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Dimana:

Y_t^{**} : Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^* : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Teknik Penghitungan Pengeluaran per kapita disesuaikan:

- Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dari susenas
- Menghitung nilai riil dari rata-rata pengeluaran per kapita
- Menghitung PPP
- Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan

2.2. Tahap Penghitungan IPM

Beberapa tahapan dalam penghitungan IPM dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tahap Pertama

Tahap pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-masing komponen IPM (Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran)

Dimensi Kesehatan

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

Dimana:

- AHH : Angka Harapan Hidup saat lahir
- AHH_{maks} : Nilai maksimum AHH (85)
- AHH_{min} : Nilai minimum AHH (20)

Dimensi Pendidikan

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Besarnya nilai indeks HLS dan RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Dimana:

- I_{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah
- HLS : Harapan Lama Sekolah
- HLS_{maks} : Nilai maksimum Harapan Lama Sekolah
- HLS_{min} : Nilai minimum Harapan Lama Sekolah

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dimana:

- I_{RLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah
- RLS : Harapan Lama Sekolah

RLS_{maks} : Nilai maksimum Harapan Lama Sekolah

RLS_{min} : Nilai minimum Harapan Lama Sekolah

Rumus Dimensi Standar Hidup Layak

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Keterangan : Indeks pengeluaran diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan

+ Tahap Kedua

Tahap kedua dari penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran dengan rumus:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

+ Tahap Ketiga

Tahap ketiga yaitu menghitung kecepatan IPM yang digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu yang dilihat dari ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Berikut ini rumus untuk menghitung besarnya pertumbuhan IPM:

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Dimana:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun t-1

2.3. Kategori Peringkat Pembangunan Manusia

Pengkategorian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut :

Klasifikasi	Capaian IPM
Sangat Tinggi	$IPM \geq 80$
Tinggi	$70 \leq IPM \leq 80$
Sedang	$60 \leq IPM \leq 70$
Rendah	$IPM < 60$



TINJAUAN UMUM

3.1. GEOGRAFIS

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah geografis terbentang pada koordinat $0^{\circ} 06' 56'' - 2^{\circ} 01' 41''$ LS dan $121^{\circ} 05' 25'' - 123^{\circ} 06' 17''$ BT. Bila ditinjau dari letak astronomis tersebut, estimasi panjang wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang membujur antara $121^{\circ} 05' 25'' - 123^{\circ} 06' 17''$ BT mencapai 212 Km. Sedangkan lebarnya yang melintang pada koordinat $0^{\circ} 06' 56'' - 2^{\circ} 01' 41''$ LS diperkirakan mencapai 89 Km.

Secara administratif, Kabupaten Tojo Una-Una berbatasan langsung dengan batas-batas wilayah:

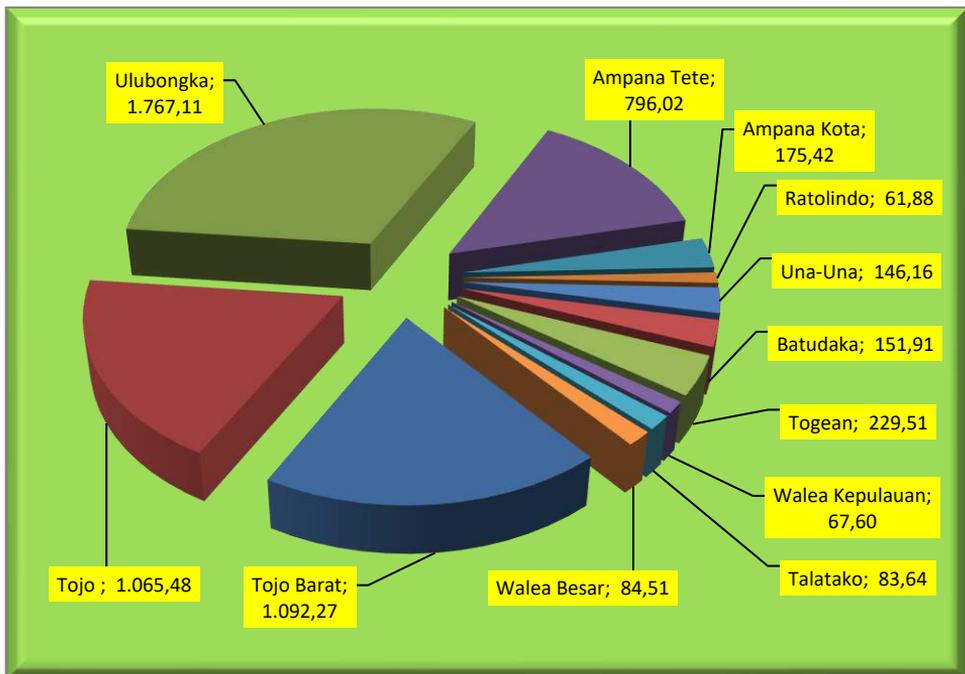
- ✚ Sebelah Utara : berbatasan dengan Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara
- ✚ Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Morowali
- ✚ Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Banggai
- ✚ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Poso

Kabupaten Tojo Una-Una yang beribu kota di Ampana merupakan pecahan dari Kabupaten Poso dan terdiri dari 12 kecamatan dengan luas wilayah daratan diperkirakan sekitar 5.721,51 Km² atau 8,41 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Aspek geografis membagi wilayah Kabupaten Tojo Una-Una menjadi dua yaitu wilayah daratan dan wilayah

kepulauan. Wilayah daratan meliputi 6 kecamatan yang sebagian besar merupakan wilayah pesisir pantai. Demikian juga wilayah kepulauan yang terdiri dari 6 kecamatan, merupakan gugusan pulau-pulau nan eksotik berjumlah sekitar 81 pulau yang sudah memiliki nama dan 41 pulau diantaranya sudah berpenghuni.

Gambar 3.1.

**Luas Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una menurut Kecamatan (km²),
2017**



Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una

Ditinjau dari posisinya di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak di pesisir pantai dan perairan Teluk Tomini. Kawasannya meliputi dataran, hutan dan lembah pegunungan. Secara geologis wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada Lipatan Fennema dan Tineba yang terbentang di bagian Barat, Pegunungan Takolekaju di

bagian Barat Daya, deretan pegunungan Verbeek di bagian Tenggara, dan Pegunungan Lumut di bagian Timur Laut.

3.2. KEPENDUDUKAN

Kependudukan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan dan realisasi pembangunan. Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Dalam konteks penduduk sebagai potensi SDM, mengandung arti bahwa penduduk/manusia memiliki peranan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Oleh sebab itu, perkembangan penduduk harus diarahkan pada peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas, serta pengarahan mobilitasnya, mempunyai ciri dan karakteristik yang menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan penduduk. Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan, data kependudukan sangat diperlukan baik mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah.

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk tahun 2016 Kabupaten Tojo Una-Una mencapai 149.214 jiwa yang terdiri atas 76.315 jiwa penduduk laki-laki dan 72.899 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Tojo Una-Una mengalami pertumbuhan sebesar 1,14 persen dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,69.

Tabel 3.1.

Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una menurut Kecamatan, 2016

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
(1)	(2)	(3)
1. Tojo Barat	8,22	11
2. Tojo	8,97	13
3. Ulubongka	11,23	9
4. Ampana Tete	16,25	30
5. Ampana Kota	12,49	106
6. Ratolindo	17,12	413
7. Una-Una	5,29	54
8. Batudaka	3,69	36
9. Togean	6,54	43
10. Walea Kepulauan	3,43	76
11. Talatako	3,93	70
12. Walea Besar	2,85	50
Tojo Una-Una	100,00	26

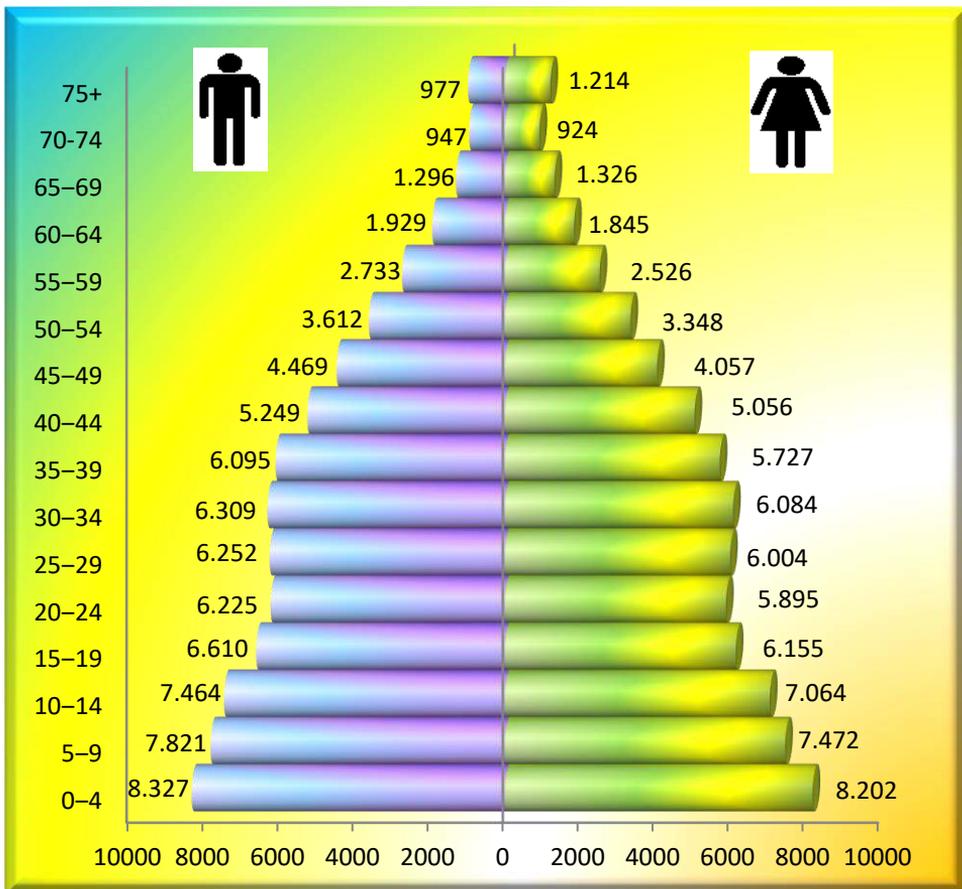
Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una

Tingkat kepadatan penduduk dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah, sehingga didapatkan angka rata-rata kepadatan penduduk. Dengan luas wilayah sebesar 5.721,51 km² kepadatan penduduk di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016 adalah 26 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk setiap wilayah pada 12 kecamatan di Kabupaten

Tojo Una-Una cukup beragam. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ratolindo, sebesar 413 jiwa/km² dan terendah adalah Kecamatan Ulubongka dengan kepadatan sebesar 9 jiwa/km².

Gambar 3.2.

Piramida Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una, 2016



Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 keatas) yang berarti

semakin rendahnya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) karena semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya serta mengembangkan kemampuan pada segala bidang. Berdasarkan piramida penduduk dalam gambar di bawah, komposisi penduduk Tojo Una-Una dikuasai oleh penduduk muda/dewasa. Hal ini terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menunjukkan pola menggelembung di tengah.

Dependency ratio dapat digunakan sebagai alat ukur perekonomian suatu wilayah. *Dependency ratio* menunjukkan perbandingan antara banyaknya penduduk usia produktif dengan penduduk usia yang nonproduktif. Tabel di bawah ini menyajikan *dependency ratio* (angka beban ketergantungan penduduk). Jumlah penduduk usia produktif Kabupaten Tojo Una-Una 96.180 orang (64,46 persen), sedangkan usia tidak produktif 52.436 orang (35,54 persen). Nilai *dependency ratio* total sebesar 55,14 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Tojo Una-Una menanggung 55 penduduk bukan usia produktif atau dapat dikatakan bahwa setiap 2 orang penduduk usia produktif menanggung 1 orang penduduk usia tidak produktif. Angka ini relatif sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, maka angka beban ketergantungan penduduk perempuan relatif lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Terkait dengan IPM besarnya angka beban ketergantungan akan mengurangi keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap turunnya angka IPM.

Tabel 3.2.

Dependency Ratio Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2016

Jenis Kelamin	Usia Produktif 15-64	Usia Tidak Produktif (th)		<i>Dependency Ratio</i>
		0-14	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	49 483	23 612	22 738	54,22
Perempuan	46 697	3 220	3 464	56,11
L+P	96 180	46 350	6 684	55,14

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una

3.3. PENDIDIKAN

Kualitas SDM suatu daerah sangat tergantung dari tingkat pendidikan penduduknya. Oleh karena itu pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Dengan pendidikan kualitas penduduk akan menjadi lebih baik. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan nasional. Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam pembentukan kualitas SDM yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendidikan telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program, diantaranya pengadaan sarana

dan prasarana pendidikan, program wajib belajar 9 tahun, beasiswa dan lain-lain.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memadai merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan. Pada tahun ajaran 2016/2017 sarana dan prasarana pendidikan baik negeri maupun swasta di Kabupaten Tojo Una-Una terlihat cukup memadai.

Untuk tingkat sekolah dasar negeri maupun swasta baik yang dikelola oleh Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Agama tercatat 192 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 1.508 orang. Dengan jumlah murid 21.063 orang, maka rasio murid-guru pada tahun ajaran 2016/2017 adalah 13,96. Artinya secara rata-rata satu orang guru mempunyai beban mengajar sebanyak kurang lebih 13 sampai 14 orang murid. Dari 192 sekolah dasar atau sederajat yang ada, 64,06 persen diantaranya terletak di wilayah darat Kabupaten Tojo Una-Una.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMTP) sederajat, terdapat 65 sekolah. Dari jumlah tersebut, 16 sekolah atau 24,62 persen berada dibawah Kementerian Agama yang biasa disebut sebagai Madrasah Tsanawiyah (MTs). Jumlah sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMTP) sederajat di Kabupaten Tojo Una-Una 64,62 persen terletak di wilayah daratan dan sisanya tersebar di 6 kecamatan yang berada di wilayah kepulauan. Jumlah siswa yang belajar pada jenjang pendidikan ini sebanyak 9.301 orang murid dan 1.959 diantaranya adalah siswa yang mengenyam pendidikan di MTs. Banyaknya tenaga pendidik yang mengajar pada jenjang pendidikan ini sebanyak 462 orang guru yang terdiri dari 375 guru Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP) dan 87

orang guru MTs. Dari jumlah ini dapat dihitung angka rasio murid-guru, dimana secara rata-rata rasio murid-guru untuk jenjang pendidikan SMTP sederajat adalah 20,13. Artinya, beban mengajar yang ditanggung oleh guru SMTP sederajat lebih tinggi dibandingkan guru SD/sederajat, yaitu sebanyak 20 hingga 21 orang murid atau 7 orang murid lebih banyak dibandingkan dengan guru SD/sederajat.

Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, tahun 2016/2017 seperti tahun sebelumnya terdapat 26 sekolah setingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) negeri maupun swasta. Dari keseluruhan jumlah tersebut, sebanyak 12 unit merupakan Sekolah Menengah Atas (SMA), sementara untuk Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) maupun Madrasah Aliyah (MA) masing-masing sebanyak 7 unit sekolah. Total siswa yang tercatat sebanyak 3.141 orang atau lebih dari separuhnya berasal dari SMA yaitu sebanyak 50,84 persen. Jumlah guru yang mengajar di jenjang pendidikan ini sebanyak 194 orang guru SMA, 171 orang guru SMK dan 17 orang guru MA. Dengan demikian beban mengajar guru MA merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan guru SMA dan SMK. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio murid-guru, sebesar 16,19 untuk SMA, sedangkan untuk SMK sebesar 12,84 dan MA sebesar 49,53. Rasio murid-guru menunjukkan beban kerja guru dalam mengajar. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Partisipasi Sekolah

Gambaran secara umum mengenai banyaknya kelompok umur yang sedang bersekolah tanpa memandang atau tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti adalah Angka Partisipasi Sekolah. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain dapat juga dilihat dengan meningkatnya indikator ini. Ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengkaji partisipasi sekolah merupakan suatu indikator proses yang menunjukkan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan diimplementasikan di masyarakat. Dalam hal ini ukuran-ukuran yang digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

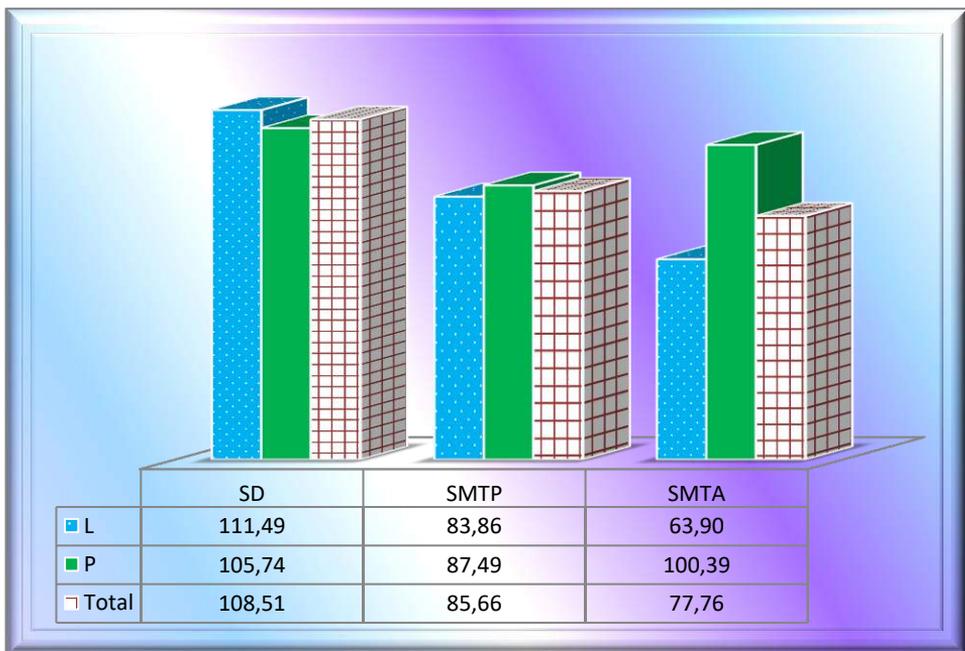
Angka Partisipasi Kasar (APK) mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu, dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa. APK suatu jenjang pendidikan bisa mempunyai nilai lebih dari 100. Ini disebabkan oleh adanya siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah (baik lebih muda ataupun lebih tua).

Berdasarkan gambar 3.3 APK SD di Kabupaten Tojo Una-Una lebih dari 100 tepatnya 108,51 persen. Hal ini mengindikasikan masih terdapatnya murid diluar batasan usia sekolah (baik lebih muda atau lebih tua) yang bersekolah di jenjang pendidikan SD. Berdasarkan jenis kelamin, APK pada tingkat SMTP dan SMTA, persentase perempuan lebih tinggi dari

laki-laki. Nilai APK untuk jenjang pendidikan SMTP dan SMTA memiliki nilai kurang dari 100. Hal ini mengindikasikan tidak semua penduduk berusia 13-15 tahun dan 16-18 tahun sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut dan kemungkinan sisanya sedang bersekolah pada jenjang pendidikan dibawahnya, diatasnya atau bahkan putus sekolah.

Gambar 3.3.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) dapat menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Menurut definisi, besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. APM selalu lebih

rendah dibandingkan APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Angka Partisipasi Kasar (APK) mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ini memberikan gambaran secara umum mengenai jumlah anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu, dan biasanya tidak memperhatikan umur siswa. APK suatu jenjang pendidikan bisa mempunyai nilai lebih dari 100. Ini disebabkan oleh adanya siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah (baik lebih muda ataupun lebih tua).

APM membatasi usia siswa sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil. Nilai APM yang lebih kecil daripada nilai APK dapat menunjukkan komposisi umur penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Selisih nilai APK dengan APM menunjukkan bahwa terdapat murid yang duduk pada jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan umurnya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah. APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dan usianya sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. APM yang bernilai 100 menunjukkan bahwa semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya.

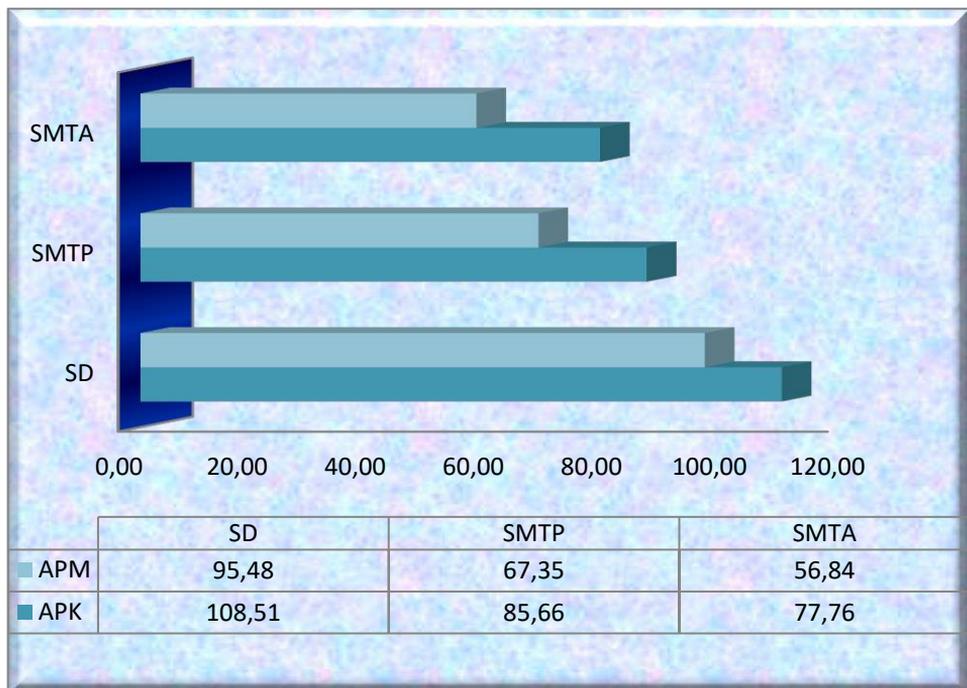
APM tingkat SD Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 95,48 persen artinya lebih dari 95,48 persen siswa usia sekolah SD (7-12 Tahun) bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikan. Masih terdapatnya murid yang mengikuti jenjang pendidikan tertentu tidak sesuai dengan kelompok umur pendidikannya dapat dilihat dari selisih APK dan APM. Pada jenjang pendidikan SD misalnya, capaian APK SD sebesar 108,51 persen sedangkan APM dengan jenjang yang sama

hanya sebesar 95,48 persen, yang berarti ada 14,52 persen murid yang bersekolah di SD tidak sesuai dengan kelompok umur pendidikannya (7-12 tahun). Besarnya disparitas tersebut utamanya disebabkan karena adanya anak usia pra sekolah (di bawah 7 tahun) dan adanya siswa yang berusia 12 tahun keatas yang masih bersekolah di SD.

Menyikapi fenomena tersebut maka perlu diantisipasi jangan sampai kesenjangan terjadi karena cukup banyaknya murid yang mengulang kelas, sehingga hal ini dapat menghambat proses pencapaian rata-rata lama sekolah dan pendidikan yang ditamatkan di masa mendatang.

Gambar 3.4.

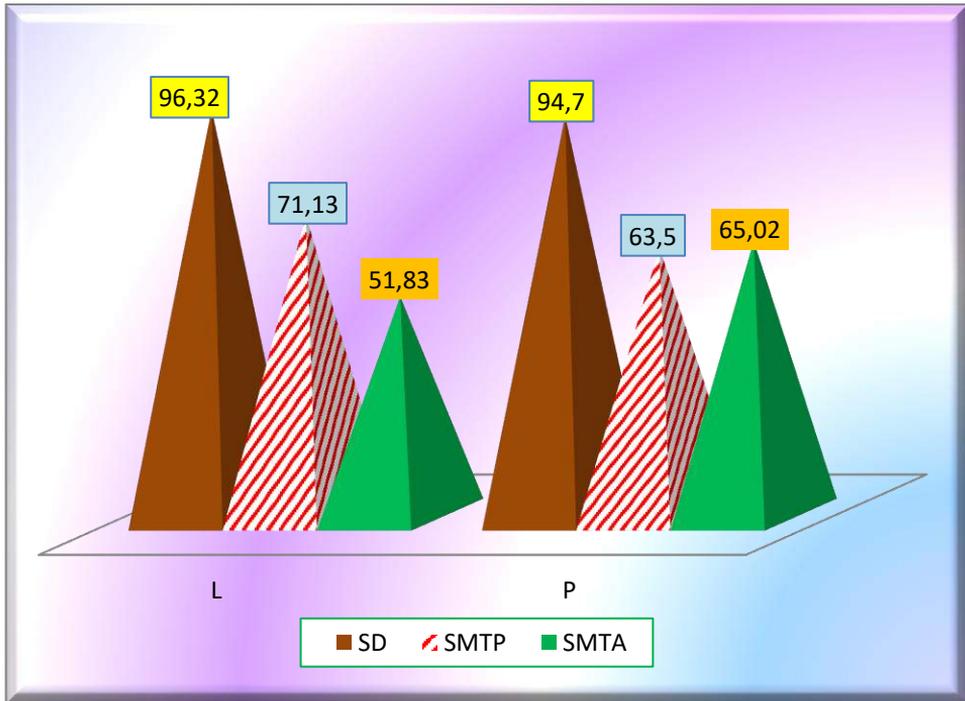
Perbandingan APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 3.5.

APM Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Kabupaten Tojo Una-Una, 2016

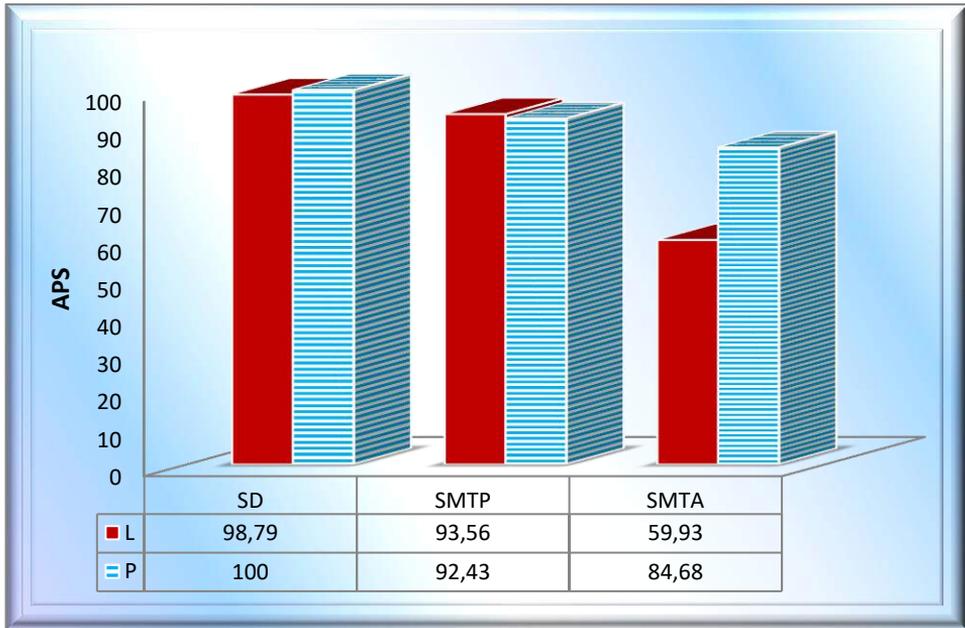


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Banyaknya penduduk yang berstatus masih sekolah pada kelompok usia sekolah tertentu merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan penduduk atau kesempatan penduduk dalam memperoleh pendidikan. Angka partisipasi sekolah (APS) menunjukkan tingkat partisipasi sekolah menurut kelompok umur.

Gambar 3.6.

**APS Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan
Kabupaten Tojo Una-Una, 2016**



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia pendidikan yang sedang bersekolah, sehingga terkait dengan program wajib belajar, indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Aspek ini menarik untuk diteliti karena berhubungan dengan keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program pendidikan dasar 9 tahun yang dapat dilihat dari besarnya persentase APS penduduk usia 7–12 tahun (SD) dan usia 13-15 tahun (SMTP). Sebagai standar, program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD lebih dari 95 persen dan APS SMTP lebih dari 70 persen.

Grafik 3.6 menunjukkan keadaan yang sangat menggembirakan dimana persentase partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun (SD) mencapai 100 persen pada tahun 2016. Untuk persentase partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun (SMTP) persentasenya mencapai 92,43 persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa APS SD dan SMTP telah mencapai target baik secara total maupun menurut jenis kelamin sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pemerintah tentang Program Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Tojo Una-Una cukup berhasil. Selain program Wajib Belajar 9 tahun, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menerapkan program sekolah gratis juga untuk jenjang pendidikan SMTA maupun SMK negeri di lingkungan Kabupaten Tojo Una-Una. Untuk jenjang pendidikan SMTA sederajat angka APS sebesar 84,68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 15,32 persen anak usia 16-18 tahun yang belum atau tidak bersekolah lagi di jenjang pendidikan SMTA/sederajat.

Jika dibandingkan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa partisipasi sekolah laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah penduduk usia 7-18 tahun masih perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terutama faktor-faktor yang menjadi penyebab anak usia sekolah tersebut tidak berada di bangku sekolah.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kondisi diatas khususnya di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, antara lain:

1. Kondisi geografis, hambatan geografis dalam artian wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yang cukup luas, dengan bentuk topografinya terbagi atas daratan dan kepulauan, menyebabkan

jarak tempuh dalam mengakses fasilitas sekolah menjadi jauh dan sulit.

2. Kemampuan ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah khususnya untuk daerah yang jauh dari ibukota kabupaten maupun ibukota kecamatan.
3. Kondisi psikologis anak, ada beberapa kasus dimana anak tidak bersekolah lagi karena faktor dari anak tersebut sehingga pemerintah perlu menelisik apa sebenarnya yang menyebabkan anak tersebut berhenti sekolah apakah sistem di sekolah, faktor lingkungan atau faktor tingkat kesadaran orang tua yang masih rendah mengenai pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya.

b. Harapan Lama Sekolah

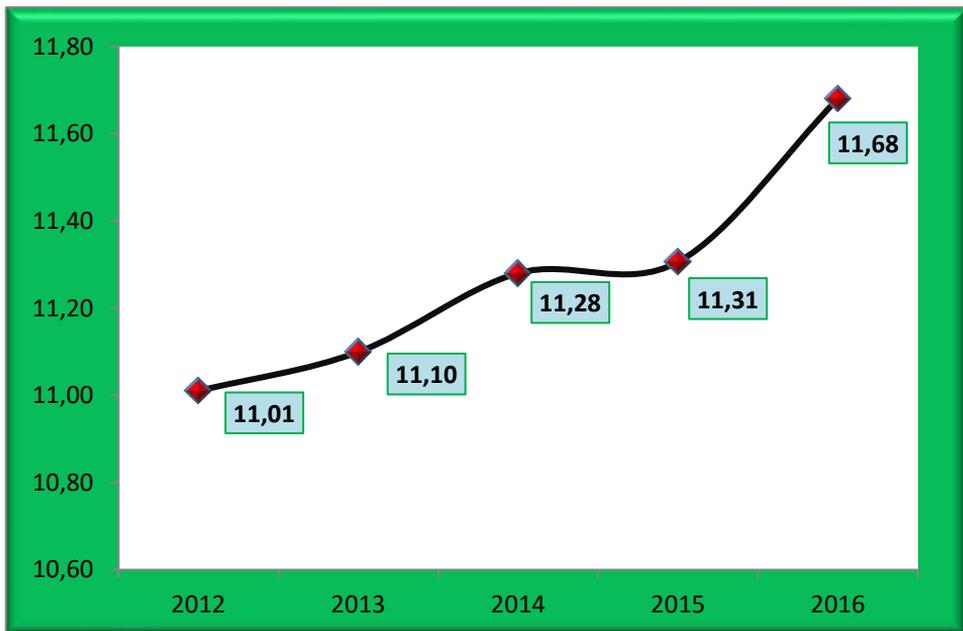
Tingkat pendidikan yang tinggi secara tidak langsung akan mencerminkan keberhasilan program pendidikan yang telah diusahakan. Beberapa indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah salah satunya adalah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS menunjukkan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Angka HLS penduduk usia 7 tahun keatas di Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu lima tahun mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Gambar 3.7 terlihat bahwa HLS pada tahun 2016 adalah 11,68 tahun. Bisa diartikan bahwa penduduk Kabupaten Tojo Una-Una yang berusia 7 tahun keatas akan menempuh pendidikan sampai 11 atau 12 tahun ke depan, sehingga diperkirakan sampai kelas 2 atau 3 tingkat SMTA. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan HLS

tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu dari 11,31 tahun pada tahun 2015 menjadi 11,68 pada tahun 2016.

Gambar 3.7.

**Perkembangan Harapan Lama Sekolah (tahun) di
Kabupaten Tojo Una-Una, 2012-2016**



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Percepatan terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas melalui berbagai program dan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah di bidang pendidikan memberikan dampak positif terhadap rata-rata HLS. Program pemerintah tersebut diantaranya adalah Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tojo Una-Una sejalan juga dengan penambahan fasilitas pendidikan di tingkat perguruan tinggi yaitu dibukanya Universitas Tadolako II. Keberadaan fasilitas pendidikan ini

mengurangi kendala jarak untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Tojo Una-Una.

c. Status Sekolah

Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah tercukupinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas SDM bisa dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Sesuai dengan amanat UUD 1945, melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk Indonesia. Berbagai program pendidikan telah dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh dan siap bersaing. Peningkatan kualitas SDM oleh pemerintah lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan khususnya penduduk kelompok usia sekolah, yaitu umur 7-24 tahun.

Berdasarkan informasi dari Tabel 3.3, terlihat bahwa ditinjau dari status pendidikannya masih terdapat 0,47 persen penduduk di Kabupaten Tojo Una-Una yang berusia 7-24 tahun berstatus tidak/belum pernah sekolah. Untuk penduduk usia sekolah yang berstatus masih sekolah, 42,35 persen berstatus masih bersekolah di SD/Sederajat; 14,61 persen berstatus masih bersekolah di SMTP/sederajat; 9,77 persen berstatus masih bersekolah di SMTA/Sederajat dan hanya 5,64 persen yang masih berstatus sekolah di perguruan tinggi.

Ditinjau dari jenis kelamin, terlihat bahwa persentase penduduk usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah di perguruan tinggi untuk

penduduk perempuan lebih besar daripada laki-laki. Faktor budaya dan lingkungan cukup berpengaruh terhadap hal tersebut. Dahulu, seorang perempuan yang telah menamatkan pendidikan SD/ sederajat akan segera dinikahkan oleh orang tuanya, namun saat ini sebagian besar perempuan akan menikah mendekati usia 30 tahun. Jumlah laki-laki yang bersekolah semakin berkurang karena tuntutan untuk mencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga.

Tabel 3.3.

Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Tdk/ blm pernah sekolah SD	Masih SD/Se derajat	Masih SMTP/ sederajat	Masih SMTA /sederajat	Masih Perguruan Tinggi	Tidak Bersekolah Lagi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tojo Una-Una	L	0,69	41,86	14,62	10,09	3,43	29,32
	P	0,26	42,84	14,60	9,45	7,79	25,07
Sulawesi Tengah	L	1,55	37,28	16,18	13,58	5,94	25,47
	P	0,88	37,56	15,53	12,10	6,57	27,36

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Proporsi penduduk usia 7-24 tahun di Kabupaten Tojo Una-Una yang masih berstatus sekolah di SD/ sederajat lebih tinggi dari angka

Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan untuk proporsi penduduk usia 7-24 tahun yang berstatus masih sekolah jenjang pendidikan lainnya mempunyai proporsi yang lebih kecil dari angka Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk yang tidak/belum pernah bersekolah memiliki nilai yang lebih baik karena lebih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Tengah. Dari total penduduk usia 7-24 tahun, sebanyak 27,17 persen diantaranya berstatus sudah tidak bersekolah lagi dan nilai ini lebih tinggi dari angka Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dapat menggambarkan bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una lebih rendah dari kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum. Hal ini sejalan dengan terbatasnya fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Tojo Una-Una khususnya untuk jenjang pendidikan SMTA/ sederajat dan Perguruan Tinggi (PT), keadaan geografis yang menjadi penghambat untuk menjangkau fasilitas pendidikan tersebut khususnya di wilayah kepulauan, serta mahalny biaya pendidikan.

d. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling/MYS*) merupakan indikator kualitas sumberdaya manusia, indikator ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk menunjukkan keadaan meningkatnya kualitas sumber daya manusia secara agregatif. Rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2012 sebesar 7,06 tahun dan selama kurun waktu lima tahun terus berkembang hingga pada tahun 2016 menjadi 7,87 tahun. Angka ini menunjukkan tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kabupaten Tojo Una-Una baru menyelesaikan sekolah dasar atau secara rata-rata

penduduk Kabupaten Tojo Una-Una masih sampai pada tingkatan tamat SD/ sederajat atau bertahan sampai di kelas dua SMTP.

Tabel 3.4.

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 25 Tahun Keatas di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tojo Una-Una	7,06	7,23	7,62	7,65	7,87
Sulawesi Tengah	7,73	7,82	7,89	7,97	8,12

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan dan pendidikan bertujuan meningkatkan pemerataan pada fasilitas pendidikan, sehingga makin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Keberhasilan pendidikan ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah pada kelompok usia sekolah. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, yaitu terciptanya kualitas masyarakat yang maju dan mandiri, Bertumpu pada perspektif tersebut, maka upaya untuk mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) jelas sangat strategis. Oleh karena itu berbagai kebijakan maupun langkah-langkah dalam pendidikan nasional direalisasikan secara benar-benar konsepsional, konsisten dan konsekuen, agar keluaran (*output*) yang

diperoleh sungguh–sungguh memiliki kualitas dalam mengantisipasi tantangan terutama dalam era globalisasi.

3.4. Kesehatan

Kesehatan merupakan indikator penting karena salah satu ukuran yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk. Pentingnya kesehatan dan gizi tercermin dari Undang-Undang Kesehatan No.23/1992 (BPS, Meneg Kependudukan/BKKBN, Depkes, DHS: 1997) yang menyatakan bahwa pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam rangka tercapainya hidup yang sehat. Selanjutnya tujuan utama di bidang kesehatan antara lain ialah menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya status gizi penduduk. Peningkatan taraf kesehatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), sedangkan peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas penduduk yang bekerja.

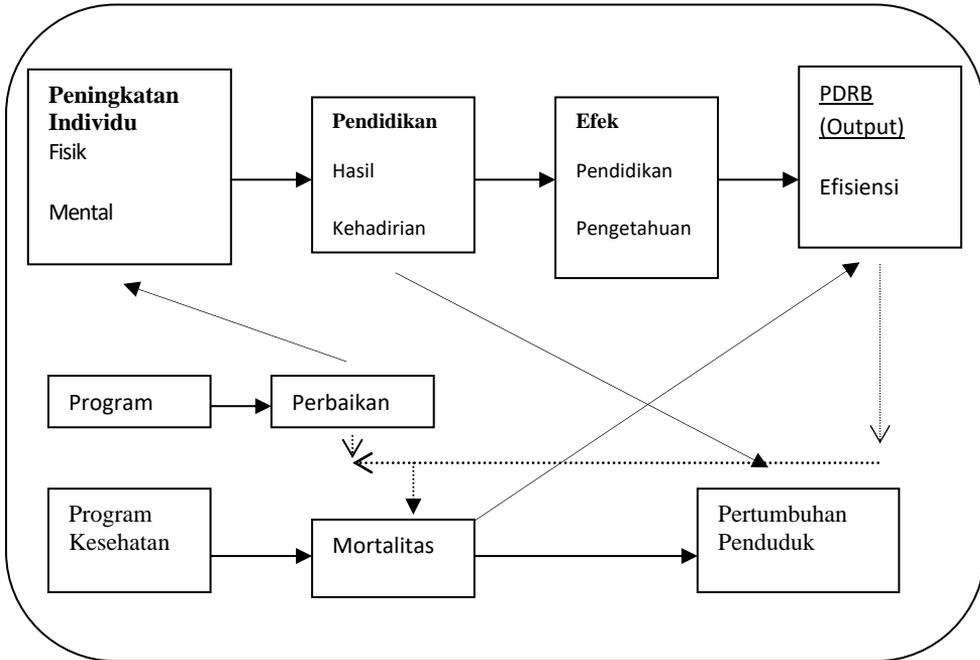
Selain kebutuhan pangan dan jasa kesehatan, kandungan gizi dalam makanan yang dikonsumsi setiap hari juga berperan penting agar tubuh tetap sehat selain melakukan olah raga secara teratur. Tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat berpenghasilan relatif tinggi pun seringkali mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi dengan komposisi yang kurang baik. Masyarakat kurang memahami bahwa makanan yang bergizi tidak selalu berarti harus yang bernilai mahal. Makanan yang nilainya relatif murah juga banyak yang mengandung gizi dengan komposisi yang seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh.

Hasil dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sumberdaya manusia adalah terletak pada keadaan kesehatannya sendiri. Rendahnya kondisi kesehatan (gizi dan kalori) akan menghasilkan pekerja-pekerja yang kurang produktif dengan mental yang kurang bagus sehingga menyebabkan produktivitas rendah dan tingkat output yang dicapai tidak optimal. Dengan demikian aspek kesehatan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya perbaikan kesehatan seseorang dapat menyebabkan peningkatan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan, bahkan perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk produktif yang dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja, semua itu dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Gambar 3.8 menunjukkan adanya semacam konsensus bahwa rendahnya derajat kesehatan masyarakat erat hubungannya dengan kemiskinan, sehingga sangat dimungkinkan apabila derajat kesehatan diperbaiki tidak saja menambah umur harapan hidup, tetapi meningkatkan pertumbuhan ekonomi (kemampuan ekonomi masyarakat) yang disebabkan makin produktifnya sumber daya manusia sebagai input bagi perkembangan perekonomian keseluruhan.

Gambar 3.8.

Hubungan Antara Program Gizi dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi



Untuk melihat keberhasilan yang telah dicapai di bidang kesehatan dapat ditelusuri antara lain melalui aspek status kesehatan dan ketersediaan fasilitas air sehat.

a. Status Kesehatan

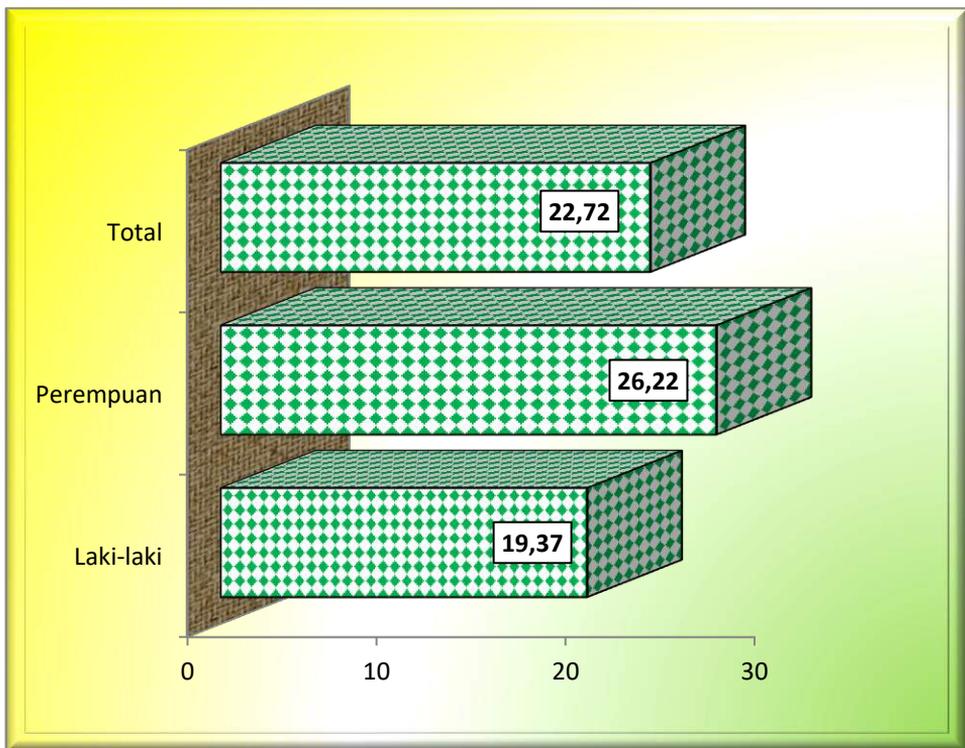
Status kesehatan menggambarkan derajat kesehatan masyarakat sebagai hasil upaya pembangunan bidang kesehatan. Indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan lamanya sakit.

Hasil Susenas tahun 2016 menunjukkan sekitar 22,72 persen penduduk Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai keluhan kesehatan, angka ini menurun dari angka 2015 (32,40 persen). Hal ini menunjukkan

bahwa program Jamkesmasda yang diterapkan pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una cukup berhasil dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakatnya. Bila dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 26,14 persen ini berarti tingkat keluhan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 3.9.

Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tabel 3.5.**Persentase Lamanya Sakit Penduduk Kabupaten Tojo Una-Una, 2016
(Hari)**

Lama Sakit	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<4	36,84	49,44	43,58
4-7	45,51	33,70	39,20
8-14	7,66	12,51	10,25
15-21	1,57	2,34	1,98
22-30	8,41	2,01	4,99

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Jika dilihat berdasarkan lamanya sakit, maka penduduk dengan lamanya sakit kurang dari 14 hari mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 95,41 persen menjadi 90,01 persen pada tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa taraf kesehatan penduduk Kabupaten Tojo Una-Una mengalami peningkatan. Namun demikian, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan lebih dari 14 hari mengalami peningkatan. Keluhan kesehatan dalam jangka waktu yang lama biasanya dikarenakan penyakit dalam atau penyakit yang bersifat kronis. Pola hidup masyarakat khususnya terhadap konsumsi makanan cepat saji, makanan yang mengandung pengawet, pewarna buatan maupun pemanis (glukosa) tinggi serta konsumsi rokok yang banyak memiliki dampak buruk bagi

kesehatan tubuh. Akibatnya penyakit yang akan ditimbulkan akan mengganggu kesehatan dalam waktu yang lama.

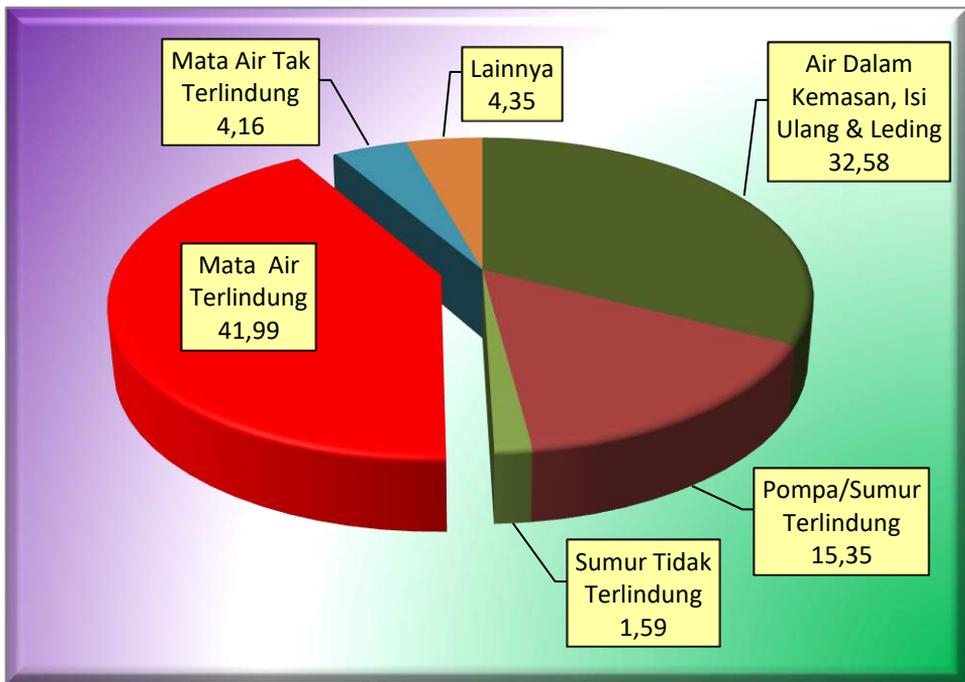
b. Ketersediaan Fasilitas Air Bersih

Tingkat kesehatan dan gizi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya penggunaan air bersih yang dikonsumsi rumah tangga, serta proporsi pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga. Anggota rumah tangga akan terhindar dari serangan berbagai jenis penyakit apabila mengkonsumsi air yang dikategorikan sehat. Demikian pula tingkat kesehatan dan gizi tercermin dari besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga akan makanan terhadap total pengeluaran rumah tangga.

Air dikatakan berkualitas apabila bersih dan sehat untuk diminum. Sumber air yang dapat dikatakan bersih antara lain air kemasan, air leding (PAM), pompa, sumur/mata air yang terlindung dari limbah/air bekas digunakan untuk mencuci/mandi. Dari Gambar 4.7, terlihat bahwa pada tahun 2016 lebih dari separuh persen rumah tangga di Kabupaten Tojo Una-Una yang menggunakan sumber air minum bersih. Tahun 2016, terdapat sebanyak 10,1 persen rumah tangga di Kabupaten Tojo Una-Una menggunakan air tidak bersih yang bersumber dari sumur/mata air tidak terlindung, air sungai, air danau, air hujan dan lainnya. Meskipun jumlah ini semakin berkurang setiap tahunnya, namun tentunya tetap perlu menjadi perhatian pemerintah dalam rangka penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat.

Gambar 3.10.

Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Tingkat kesejahteraan rumah tangga juga tercermin dari kualitas air minum yang dikonsumsi yang dapat dilihat dari fasilitasnya, cara memperolehnya dan sumbernya. Pada tahun 2016 rumah tangga di Kabupaten Tojo Una-Una menunjukkan bahwa hampir setengah populasi rumah tangga telah mempunyai fasilitas air minum sendiri (51,59 persen), yang berarti tingkat kesejahteraan rumah tangga secara umum cenderung baik.

3.5. Ekonomi

Perkembangan maupun pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB (atas dasar harga konstan) yang berhasil diperoleh pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga. Perubahan yang diukur adalah perubahan produksi sehingga menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi. Pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional provinsi dan kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan harga konstan 2011 sebagai tahun dasar.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator perekonomian yang dapat digunakan sebagai bahan penentuan kebijakan pembangunan khususnya dalam bidang perekonomian dan bahan evaluasi pembangunan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional mengalami perubahan akibat berbagai perubahan skala ekonomi, teknologi dan SDM dalam memproduksi barang dan jasa.

Tabel 3.6 menyajikan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014-2016. PDRB Kabupaten Tojo Una-Una didasarkan atas harga berlaku dan harga konstan tahun 2011. PDRB atas dasar harga berlaku Tojo Una-Una pada tahun 2016 sebesar 4.618.567,79 juta rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan sebesar 3.398.569,55 juta rupiah. Struktur ekonomi ditunjukkan oleh distribusi persentase PDRB. Secara umum, ekonomi Kabupaten Tojo Una-

Una masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2016 sektor ini mempunyai peranan terbesar terhadap penciptaan PDRB Kabupaten Tojo Una-Una dengan besar sumbangan terhadap PDRB sebesar 39,66 persen.

Tabel 3.6.

PDRB menurut Lapangan Usaha dan Persentase Perkembangan Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tojo Una-Una, 2014-2016

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan 2011	
	PDRB (Juta Rupiah)	Perkembangan Ekonomi (Persen)	PDRB (Juta Rupiah)	Perkembangan Ekonomi (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	3 869 689,78	12,91	3 048 435,15	6,86
2015	4 241 908,58	9,62	3 215 549,41	5,48
2016	4 618 567,79	8,88	3 398 569,55	5,69

Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una

Tahun 2016 ekonomi Tojo Una-Una tumbuh 5,69 persen. Angka ini meningkat 0,18 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tumbuh 5,48 persen pada tahun 2015. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi andalan ekonomi Tojo Una-Una memiliki kinerja yang baik di tahun 2016. Peningkatan produksi terutama terjadi pada komoditi unggulan Tojo Una-Una yaitu jagung. Tidak hanya jagung, berkat curah hujan yang cukup tinggi, hampir seluruh komoditi pertanian mengalami peningkatan produksi.

Percepatan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas juga dari stabilnya pertumbuhan pariwisata bahari Kepulauan Togean. Semenjak Indonesia melakukan promosi wisata yang gencar ke luar negeri, pertumbuhan kunjungan wisatawan asing ke Kepulauan Togean meningkat tiap tahunnya. Pertumbuhan kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum salah satu yang cukup tinggi dan stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Faktor berikutnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi Tojo Una-Una yaitu munculnya kawasan industri penyulingan minyak nilam di daerah Dataran Bulan (dataran bulan terdiri dari ; Desa Balingara, Desa Bulan Jaya, Desa Sukamaju, Desa Giri Mulyo, Desa Wanasari dan Desa Mpoa). Kawasan dataran bulan yang dulunya terkenal sebagai penghasil kedelai terbesar di Sulawesi Tengah kini telah menjadi kawasan penghasil minyak nilam terbesar. Hasil dari industri penyulingan ini di jual ke beberapa wilayah seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara bahkan hingga ke Pulau Jawa.

Faktor terakhir yang cukup penting juga yaitu semakin mudahnya akses keluar masuk menuju Kabupaten Tojo Una-Una. Setelah diresmikannya Bandar Udara Tanjung Api pada tahun 2014 yang mulai beroperasi di tahun 2015, kini masyarakat yang hendak menuju atau meninggalkan kabupaten Tojo Una-Una mempunyai alternatif lain selain angkutan darat (bus mapun travel). Keberadaan Bandar Udara Tanjung Api memiliki dampak yang sangat positif, terutama pada tahun 2016 setelah PT Lion Mentari Airlines (Lion Air) melalui anak perusahaan Wings Air menambah rute penerbangan Ampana-Palu.



PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TOJO UNA-UNA

4.1. Komponen IPM

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang menurut United Nations Development Program (UNDP) ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan penduduk ini dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya dan politik.

Model pembangunan manusia telah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah dari rakyat (*of people*), untuk rakyat (*for people*) dan oleh rakyat (*by people*). Pembangunan dari rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat berarti hasil pembangunan benar-benar diterima semua rakyat secara adil, buah pertumbuhan ekonomi harus terlihat pada kehidupan rakyat sehari-hari, tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Proses ini biasanya tidak secara otomatis tampak, akan tetapi memerlukan waktu serta manajemen kebijakan yang hati-hati. Pembangunan oleh rakyat berarti

rakyat harus benar-benar ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan, bukan sebagai penonton dan penerima hasil pembangunan. Dengan berperan aktif berarti ikut serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupannya.

Dua hal yang ditekankan pada konsep pembangunan manusia, yaitu peningkatan kapabilitas atau pemberdayaan, dan penciptaan peluang. Antara kapabilitas dan peluang harus seimbang. Apabila kapabilitas berhasil ditingkatkan melalui pembangunan SDM, namun tidak ada peluang atau sebaliknya apabila peluang telah tercipta tetapi tidak ditopang oleh kemampuan SDM maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia, khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah. Sebelum pembahasan mengenai perbandingan IPM antar waktu, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM. Masing-masing komponen tersebut adalah indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks paritas daya beli.

Model pembangunan adalah suatu model yang memiliki konsep lebih luas mengenai pilihan-pilihan manusia yang sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Namun sejumlah pilihan ini, ada 3 pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu, (1) pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang, (2) pilihan untuk

memiliki ilmu pengetahuan dan (3) pilihan untuk mempunyai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak. Apabila ketiga pilihan mendasar ini dapat terpenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan pula untuk meraih pilihan-pilihan lain yang juga tidak kalah pentingnya seperti pilihan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya.

Ketiga pilihan yang esensial tersebut di atas dapat tercermin dari komponen-komponen indeks pembangunan manusia sebagai berikut:

a. Indeks Kesehatan

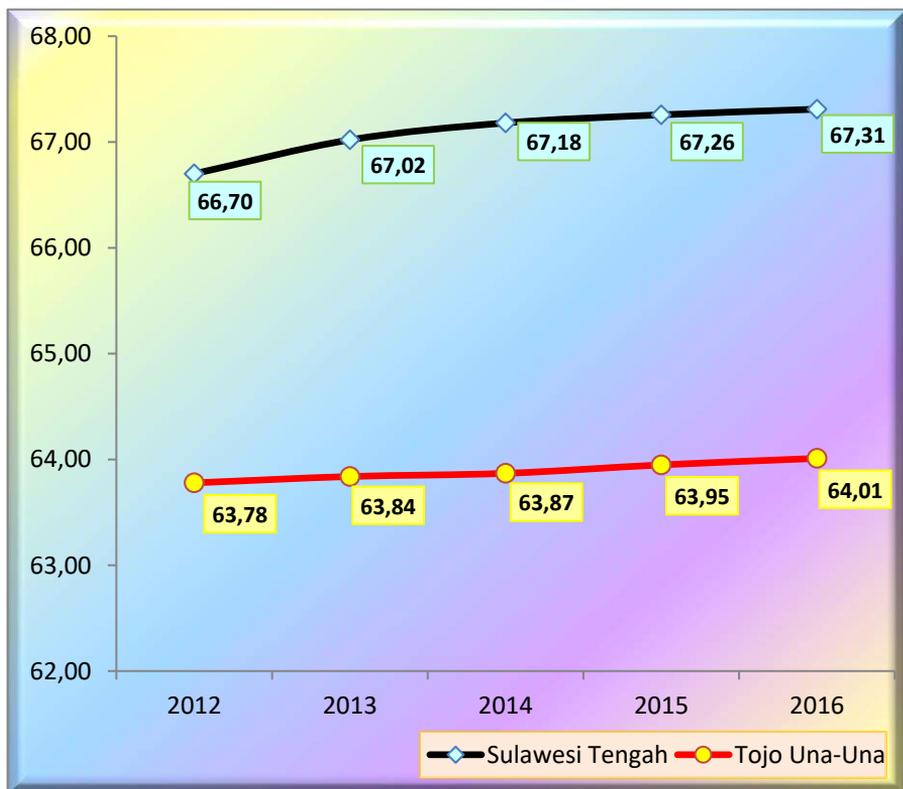
Kualitas sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan nonfisik yang tentunya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. Oleh karena itu, pengukuran indeks kesehatan diperoleh dari angka harapan hidup seseorang sejak dilahirkan. Angka harapan hidup ini sering digunakan sebagai proksi terhadap keadaan dan sistem pelayanan kesehatan suatu masyarakat. Hal itu dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro.

Indeks kesehatan yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (e_0) diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan. Pada tahun 2016 angka harapan hidup Kabupaten Tojo Una-Una tercatat sekitar 64,01 tahun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana AHH pada tahun 2015

hanya sekitar 63,95 tahun. Secara perlahan AHH terjadi peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini bisa diartikan bahwa terjadi peningkatan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Namun demikian, angka ini masih lebih rendah dibanding angka AHH Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2016 yang mencapai sekitar 67,31 tahun. Jika dilihat keterbandingan antar kabupaten, maka Kabupaten Tojo Una-Una menempati urutan ke 11 dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Gambar 4.1.

**Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una,
2012-2016**

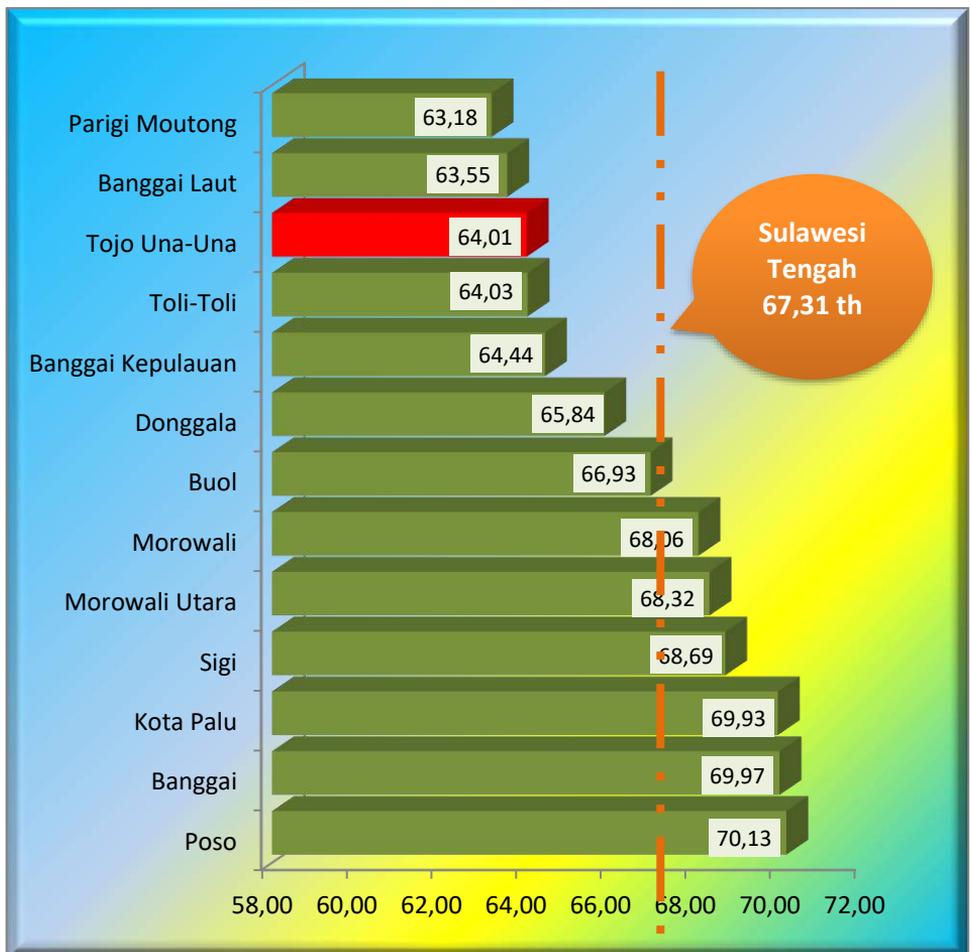


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan angka harapan hidup dapat dihitung indeks kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una, dimana indeks kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016 yaitu 67,71. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Sulawesi Tengah yang memiliki nilai sebesar 72,78. Oleh karena itu masih banyak diperlukan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Gambar 4.2.

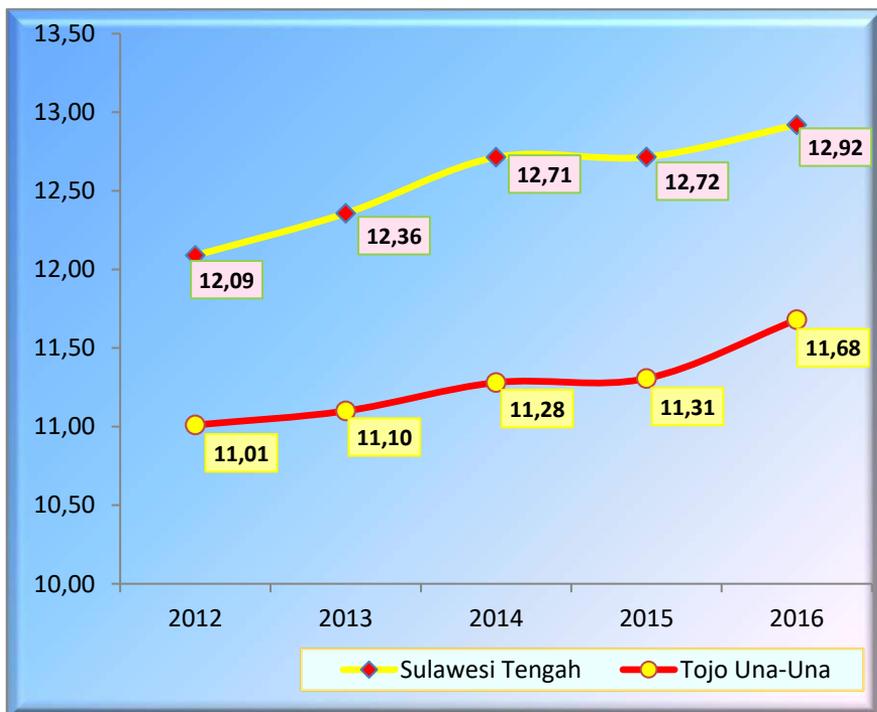
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

b. Indeks Pendidikan

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa indeks pendidikan terdiri dari dua unsur yaitu rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk 7 tahun keatas dan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk 25 tahun keatas. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Dengan angka Harapan Lama Sekolah, dapat diketahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

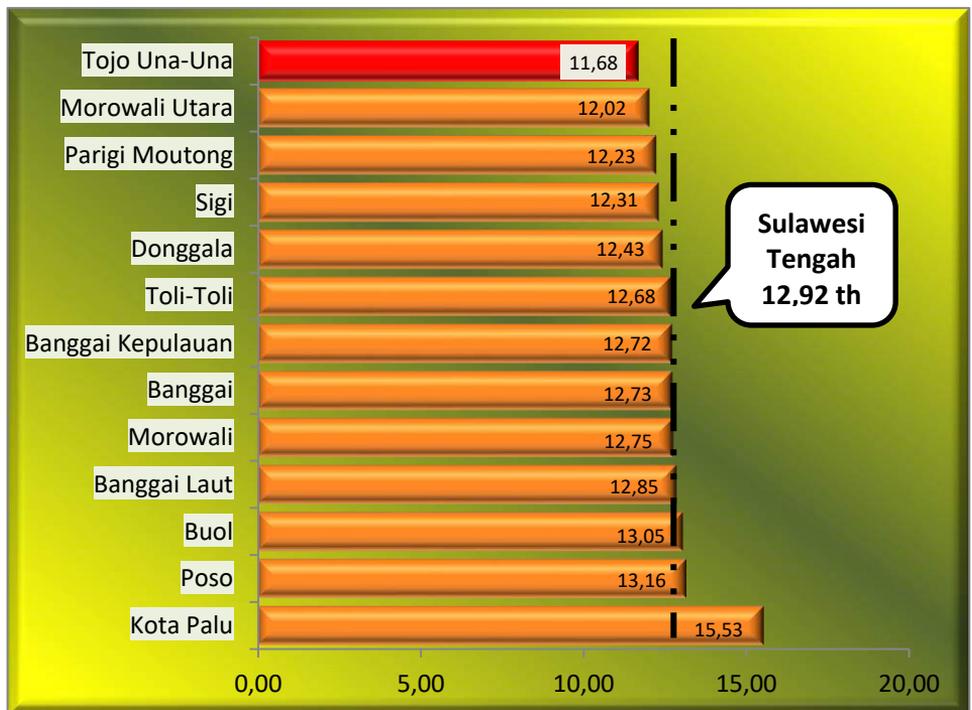
Gambar 4.3.**Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tojo Una-Una, 2016**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Komponen rata-rata HLS di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan dari 11,31 tahun pada tahun 2015 menjadi 11,68 tahun pada tahun 2016. Pada tahun 2016, angka Harapan Lama Sekolah sebesar 11,68 tahun, artinya penduduk usia 7 tahun keatas di Kabupaten Tojo Una-Una diperkirakan akan mengenyam pendidikan formal rata-rata selama 11,68 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016 masih lebih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Tengah yang bernilai sekitar 12,92 tahun.

Gambar 4.4.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016

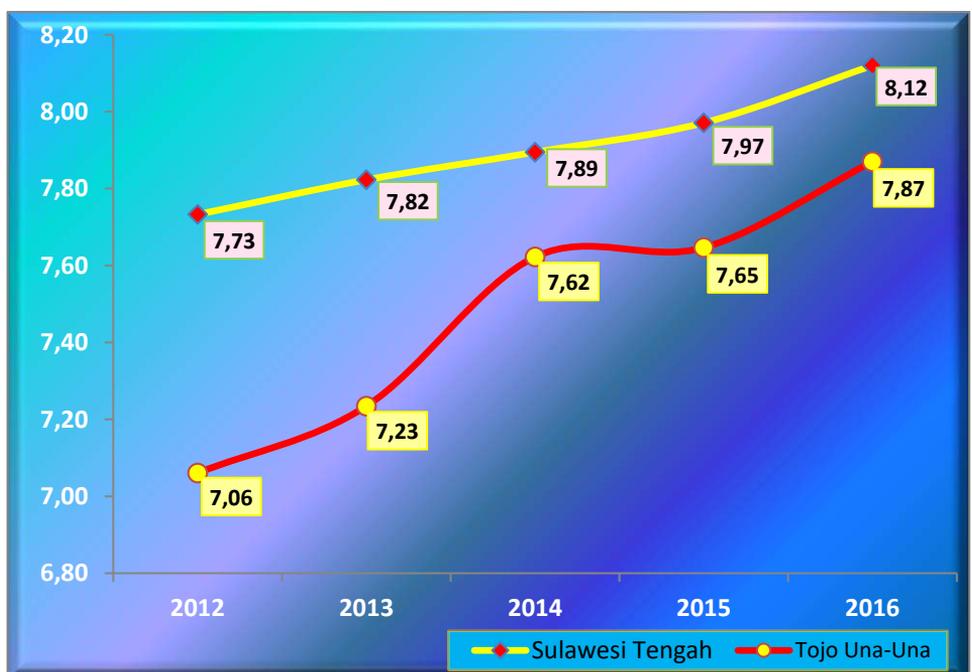


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, nilai angka HLS di Kabupaten Tojo Una-Una meskipun mengalami peningkatan lebih besar dari peningkatan HLS di Provinsi Sulawesi Tengah tetapi masih berada di peringkat terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kebijakan pemerintah yang telah ada perlu untuk terus ditingkatkan agar posisi Kabupaten Tojo Una-Una bisa sejajar dengan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang lainnya. Terbatasnya akses terhadap fasilitas pendidikan, kesulitan geografis dan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan bagi anak menjadi faktor pendukung rendahnya angka rata-rata HLS di Kabupaten Tojo Una-Una.

Gambar 4.5.

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tojo Una-Una, 2012-2016

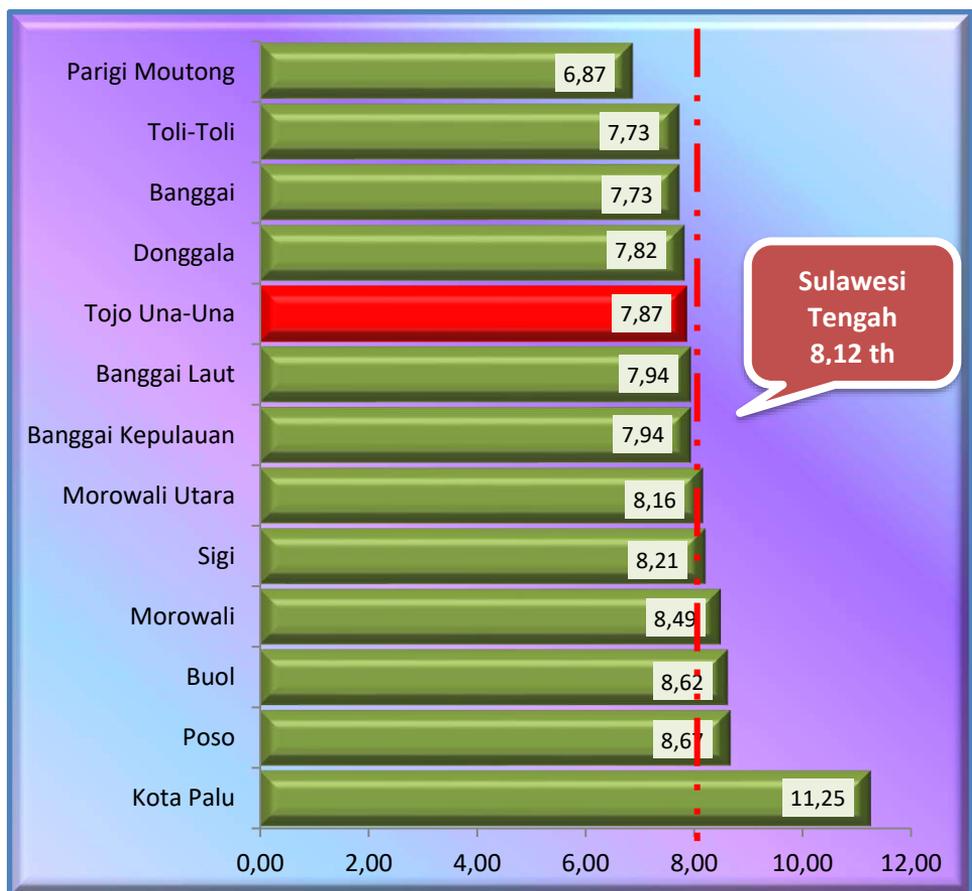


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

RLS digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan pendidikan penduduk suatu daerah, yaitu rata-rata waktu yang telah dihabiskan penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang telah dijalani. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel secara simultan, yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Gambar 4.6.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Seperti halnya dengan Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 meningkat menjadi 7,87 tahun dibandingkan tahun 2015 yang bernilai sebesar 7,65 tahun. Dengan angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 7,87 tahun dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Tojo Una-Una yang berusia 25 tahun keatas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 1 atau 2 SMTP atau belum sepenuhnya bisa menikmati program wajib belajar (WAJAR) 9 tahun.

Sama kondisinya dengan capaian Angka Harapan Hidup dan angka Harapan Lama Sekolah, angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Tojo Una-Una masih lebih rendah dibandingkan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Sulawesi Tengah yang bernilai 8,12 tahun. Untuk meningkatkan percepatan HLS dan RLS di Kabupaten Tojo Una-Una, maka sektor pendidikan ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan dua indikator pendidikan, HLS dan RLS, selanjutnya dapat dihitung besarnya nilai indeks pendidikan setiap tahunnya berdasarkan rumus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Indeks Pendidikan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 sebesar 58,68. Angka ini lebih rendah dari angka Provinsi Sulawesi Tengah yang bernilai sekitar 62,96.

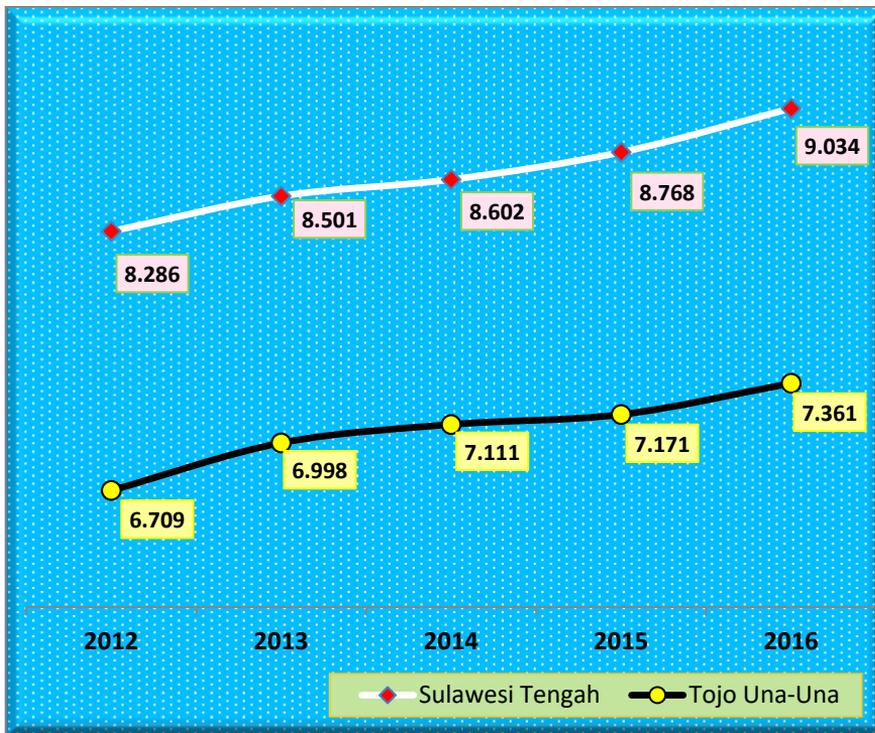
c. Indeks Pengeluaran

Indeks pengeluaran diproksi dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Nilai dari pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli

(*Purchasing Power Parity-PPP*). Data rata-rata pengeluaran per kapita setahun bersumber dari BPS, kemudian data ini akan dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012=100. Paritas daya beli atau dikenal sebagai komponen PPP (*Purchasing Power Parity*) atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, menunjukkan seberapa besar jumlah barang/jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat yang disesuaikan dengan pendapatan yang diterima/dimiliki. Dalam laporan ini digunakan PDRB riil per kapita. Penggunaan PDRB riil per kapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi susenas) belum sampai estimasi kabupaten/kota. Namun dengan asumsi bahwa PDRB Kabupaten Tojo Una-Una dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat pendapatan sebagai indikator standar hidup layak.

Berdasarkan Gambar 4.7 diperoleh gambaran rata-rata pengeluaran riil per kapita penduduk Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2016 sebesar Rp. 7,36 juta per tahun. Angka ini lebih tinggi dari keadaan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 7,17 juta di tahun 2015. Dibandingkan dengan capaian pengeluaran riil per kapita Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 sebesar Rp 9,03 juta rupiah, maka dapat dikatakan kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Tojo Una-Una dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak lebih rendah daripada penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Tojo Una-Una kedepannya perlu lebih meningkatkan pembangunan ekonomi baik dari segi laju pertumbuhan maupun pemerataan hasilnya dan pembangunan manusia.

Gambar 4.7.
Perkembangan Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten
Tojo Una-Una (Rp. 000), 2012-2016

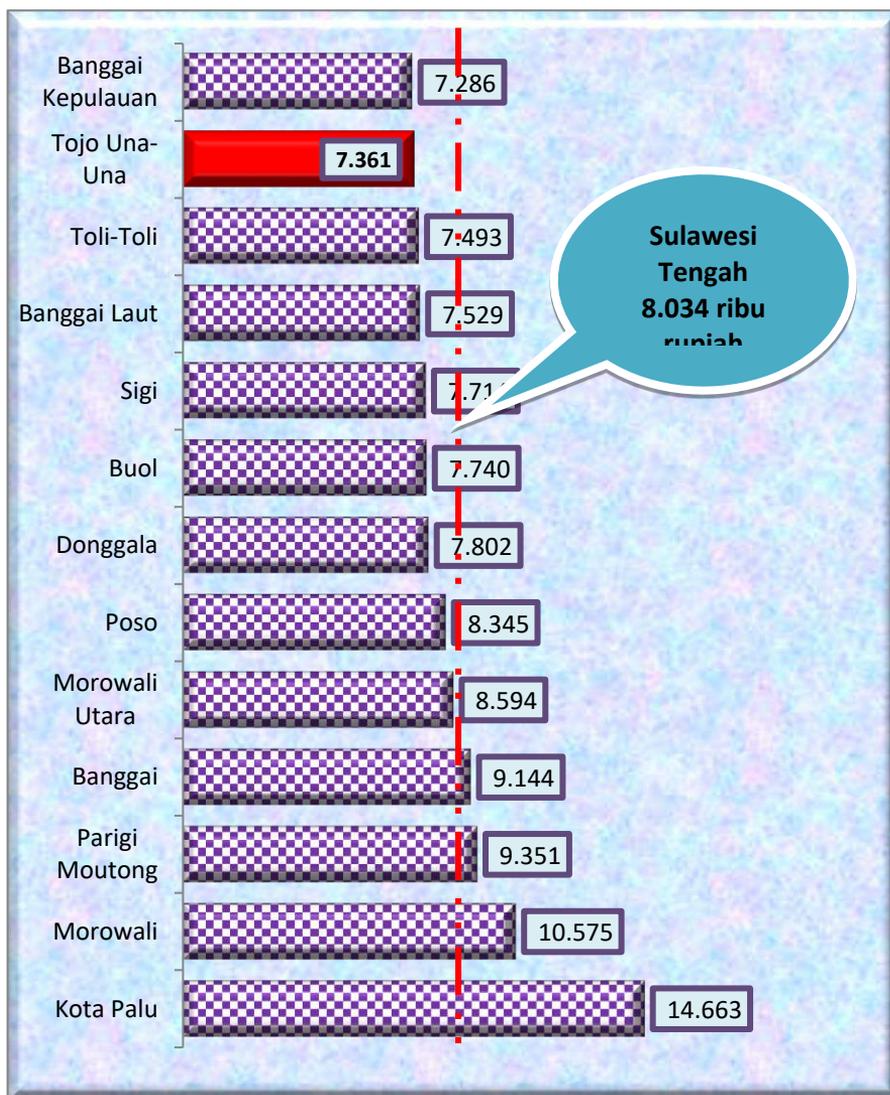


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Indeks Pengeluaran Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 sebesar 60,77 sedangkan Provinsi Sulawesi Tengah sekitar 67,03. Dari 13 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Tengah hanya 4 kabupaten yang memiliki pengeluaran riil per kapita diatas rata-rata angka provinsi.

Gambar 4.8.

Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, 2016



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

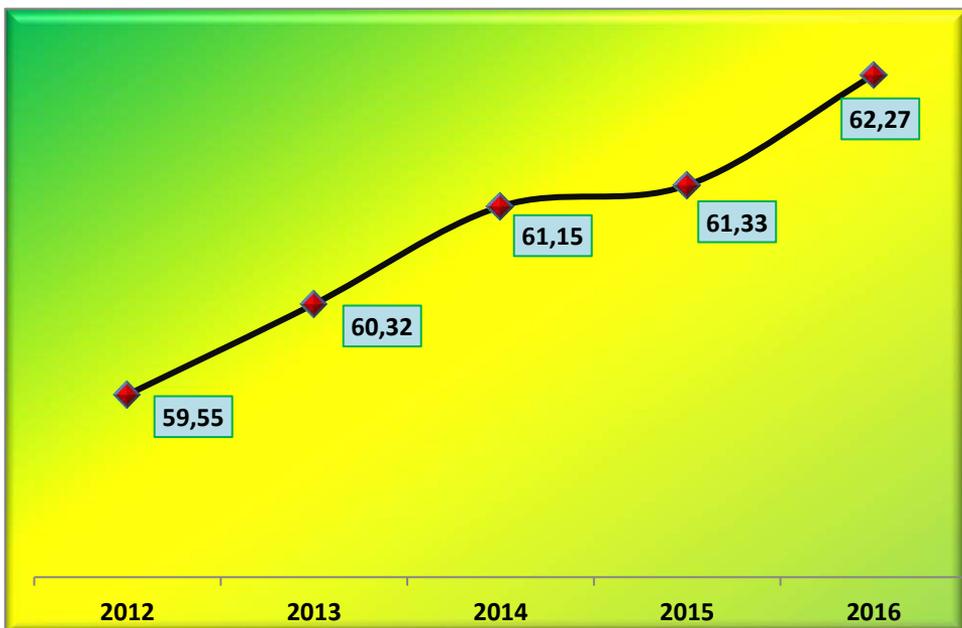
4.2. IPM Kabupaten Tojo Una-Una

Manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan harus mampu meningkatkan kualitas hidupnya, untuk itu peran pemerintah dan

masyarakat sangat dibutuhkan. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna sebagai peningkatan kemampuan dasar penduduk. Kemampuan dasar penduduk tersebut diperlukan untuk memperbesar kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan suatu gambaran komprehensif untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia.

Gambar 4.9.

Perkembangan IPM Kabupaten Tojo Una-Una, 2012-2016



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (output pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Dari agregat ketiga indikator tunggal penyusun IPM Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2016, diperoleh angka IPM Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 62,27 (sebagaimana terlihat pada Gambar 4.8). Pencapaian angka IPM tersebut mengalami pertumbuhan tertinggi diantara 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu tumbuh sebesar 1,51 persen dari tahun 2015. Meningkatnya nilai IPM ini dipengaruhi oleh berbagai program dan kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan maupun ekonomi oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Disamping itu juga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una akan pentingnya kesehatan yang tercermin pada meningkatnya Angka Harapan Hidup, kesadaran akan pentingnya pendidikan yang tercermin pada meningkatnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, serta daya beli masyarakat yang semakin bertambah. Hal ini mengindikasikan telah terjadi peningkatan kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Tojo Una-Una.

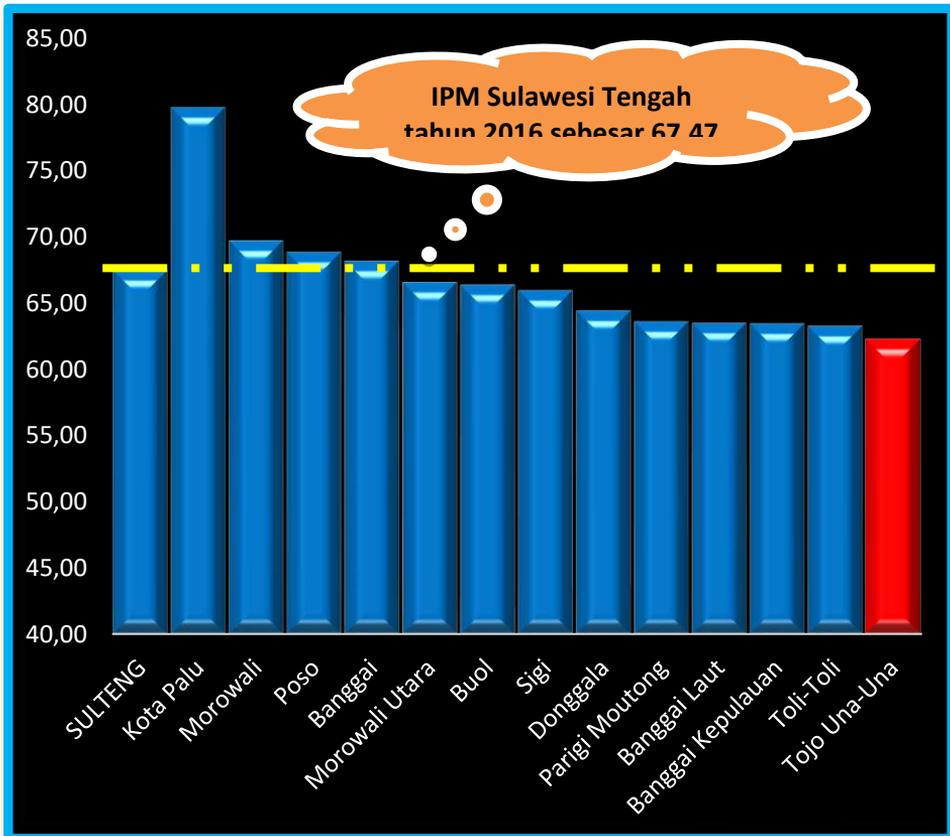
Capaian Nilai IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori :

- $IPM \geq 80$ = Sangat Tinggi
- $70 \leq IPM < 80$ = Tinggi

- $60 \leq \text{IPM} < 70$ = Sedang
- $\text{IPM} \geq 60$ = Rendah

Gambar 4.10.

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2016



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan kriteria pengklasifikasian nilai IPM, dengan capaian IPM sebesar 62,27 pada tahun 2016, maka Kabupaten Tojo Una-Una menurut konsep pembangunan yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masuk kategori kinerja pembangunan manusia “sedang”, yaitu capaian IPM diantara 60-70. Demikian juga dengan capaian IPM Provinsi Sulawesi Tengah masuk kategori pembangunan

“sedang” dengan IPM tahun 2016 sebesar 67,47. Dari 13 kabupaten/kota yang berada di Sulawesi Tengah hanya Kota Palu yang memiliki capaian pembangunan manusia kategori “tinggi” karena memiliki nilai IPM tahun 2016 sebesar 79,73.

4.3. Pertumbuhan IPM Kabupaten Tojo Una-Una

Pertumbuhan IPM digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Pada tahun 2016 pertumbuhan IPM Kabupaten Tojo Una-Una adalah 1,53. Angka ini tertinggi diantara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menunjukkan kecepatan pembangunan manusia di Kabupaten Tojo Una-Una adalah yang terbaik di Sulawesi Tengah selama satu tahun terakhir. Bersama 3 kabupaten lainnya yaitu Banggai, Buol dan Parigi Moutong, angka pertumbuhan IPM Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2016 lebih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki nilai pertumbuhan IPM sebesar 1,07. Meningkatnya pertumbuhan IPM di Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tojo Una-Una dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas pembangunan manusia di wilayah tersebut akibat dari meningkatnya kinerja pemerintah maupun kesadaran masyarakat untuk melakukan perubahan yang positif di bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian.

**Tabel 4.1. Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016**

Kabupaten/Kota	2015	2016
(1)	(2)	(3)
1. Banggai Kepulauan	1,02	0,76
2. Banggai	0,48	1,09
3. Morowali	1,78	0,83
4. Poso	0,71	1,03
5. Donggala	0,42	0,94
6. Toli-Toli	1,30	0,88
7. Buol	0,30	1,16
8. Parigi Moutong	0,94	1,30
9. Tojo Una-Una	0,29	1,53
10. Sigi	1,10	0,92
11. Banggai Laut	1,25	0,94
12. Morowali Utara	0,29	0,86
13. Kota Palu	0,64	0,13
SULAWESI TENGAH	0,49	1,07

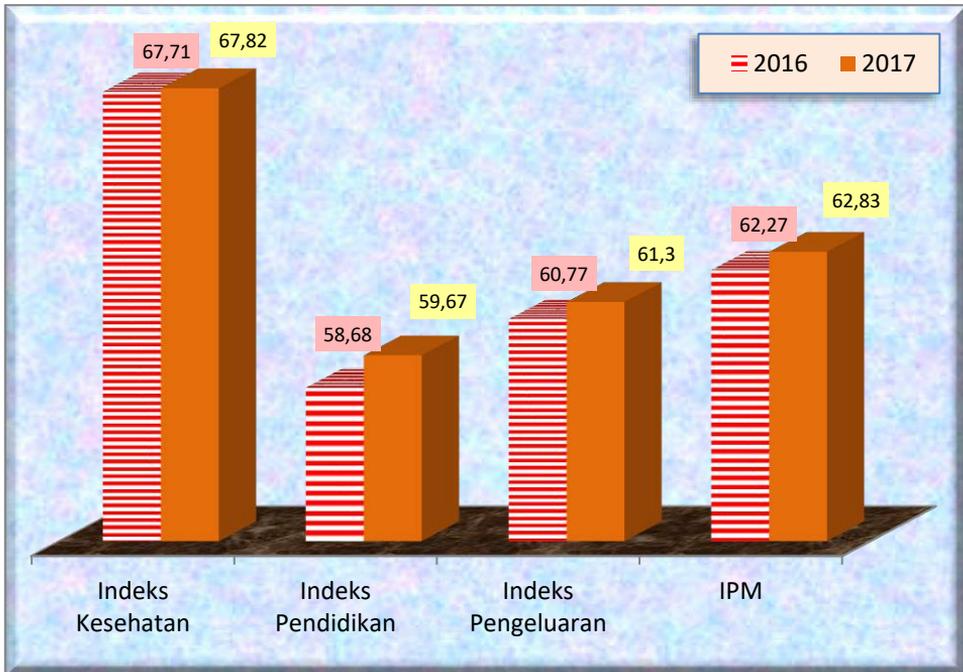
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

4.4. IPM Kabupaten Tojo Una-Una 2017

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berhubungan langsung dengan perbaikan indikator-indikator kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Jika ketiga indikator tersebut memiliki kualitas yang baik, maka diharapkan kualitas dan derajat kehidupan manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Rata-rata usia hidup yang semakin panjang mengindikasikan bahwa masyarakat telah mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang memadai, kualitas lingkungan yang sehat serta memiliki gaya hidup sehat. Pembangunan di sektor pendidikan berupa

peningkatan pelayanan pendidikan yang merata, terjangkau dan kompetitif akan mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Disamping kedua hal diatas, tanpa kemampuan daya beli yang memadai maka kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan, kesehatan dan pendidikan menjadi terbatas. Besarnya daya beli menunjukkan tingkat konsumsi penduduk untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dengan semakin meningkatnya daya beli maka kesejahteraan penduduk semakin membaik.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, IPM Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, tetapi jika ditinjau dari pertumbuhannya mulai melambat pada tahun 2015 tetapi pada tahun 2016 kembali meningkat bahkan dengan pertumbuhan tertinggi di Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kemajuan pembangunan manusia tercepat di Sulawesi Tengah. Seiring dengan digulirkannya berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maka diharapkan IPM Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 kembali mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tojo Una-Una, angka IPM Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 diperkirakan sebesar 62,83. Jika dibandingkan dengan angka IPM tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Tojo Una-Una tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,90 persen dibandingkan tahun 2016.

Gambar 4.11.**IPM dan Indeks Penyusunnya di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016-2017**

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Ditinjau dari indikator kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) sejak lahir penduduk di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 adalah 64,08 tahun. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 1 persen dari tahun sebelumnya yang bernilai 64,01 tahun. Untuk indikator pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun keatas di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 adalah 11,89 tahun atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,02 persen dari tahun 2016. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun keatas mengalami pertumbuhan sebesar 1,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 8 tahun pada 2017, sedangkan tahun 2016 selama 7,87 tahun. Dilihat dari segi pengeluarannya, rata-rata pengeluaran riil penduduk Kabupaten Tojo

Una-Una pada tahun 2017 sekitar 7.489 ribu rupiah. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 1,02 persen dibandingkan tahun 2016. Menguat atau melemahnya pertumbuhan IPM dan indikatornya dipengaruhi oleh inovasi dan intervensi yang signifikan oleh pemerintah daerah terhadap indikator-indikator pendukung IPM.



PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab 1 hingga Bab 4, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut UNDP (1990), pembangunan manusia adalah upaya peningkatan produktivitas dan pemberdayaan penduduk secara merata dan berkesinambungan. Penduduk akan semakin produktif dan berdaya apabila minimal mempunyai peluang hidup (*longevity*) yang makin panjang, penguasaan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang makin tinggi dan luas, serta standar hidup layak (*decent standard of living*). Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur diatas, UNDP telah memperkenalkan suatu Indeks Komposit yang dinamakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun berdasarkan 4 (empat) indikator dasar, yaitu: Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy at Age*), Angka Harapan Lama Sekolah (*Expected Year of Scholling*), Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*), dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (*Purchasing Power Parity*).
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tojo Una-Una selama 2012-2016 menunjukkan terjadinya peningkatan nilai. Nilai IPM tersebut naik dari 59,55 pada tahun 2012 menjadi 60,32 pada

tahun 2013, naik menjadi 61,15 pada tahun 2014, kemudian naik lagi menjadi 61,33 pada tahun 2015 dan 62,27 pada tahun 2016.

4. Berdasarkan konsep pembangunan yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka IPM Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2012-2016 masuk kategori kinerja pembangunan manusia “sedang”, yaitu capaian IPM diantara 60-70
5. Pertumbuhan IPM Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2012-2014 mengalami kenaikan dengan kisaran pertumbuhan diatas 1 persen per tahun, namun pada tahun 2015 mulai menurun dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,29 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh melemahnya pertumbuhan di sektor pendidikan dan ekonomi
6. Tahun 2016 Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kecepatan pembangunan manusia tertinggi di Sulawesi Tengah yang ditunjukkan dari besarnya pertumbuhan tertinggi nilai IPM yang dicapai, yaitu sebesar 1,53 persen
7. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan yang dilakukan oleh Bappeda dan PM, nilai IPM Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 62,83 dengan indikator AHH 64,08 tahun, HLS 11,89 tahun, RLS 8 tahun dan pengeluaran riil per kapita sebesar 7.489 ribu rupiah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil yang telah dicapai serta mempertimbangkan potensi dan kendala yang dihadapi, maka untuk terus meningkatkan nilai IPM melalui indikator-indikator pendukungnya, pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una perlu merancang program peningkatan

kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan penduduk secara umum. Sedangkan untuk upaya peningkatan daya beli dapat merupakan dampak berantai dari upaya peningkatan pendidikan penduduk. Untuk itu, beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kesehatan dapat dilakukan melalui :
 - Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai cara hidup yang sehat (upaya pencegahan) dan upaya pengobatan baik tradisional maupun modern.
 - Peningkatan ketersediaan layanan kesehatan terutama berupa revitalisasi posyandu dan layanan puskesmas.
 - Pengawasan terhadap keberadaan tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil yang jauh dari fasilitas layanan kesehatan lebih diperketat.
 - Meningkatkan kemitraan antara tenaga kesehatan dan non kesehatan (dukun beranak) dalam penanganan proses kelahiran sehingga resiko kematian bayi maupun ibu pada saat melahirkan semakin menurun.
2. Upaya pendidikan masyarakat dapat dilakukan melalui :
 - Pemberantasan buta huruf melalui kejar Paket A perlu dilanjutkan dengan kegiatan seperti kelompok pembaca sehingga kemampuan peserta yang telah lulus dapat terjaga.
 - Upaya pengajar terhadap anak-anak yang terpaksa harus bekerja mendukung perekonomian rumah tangga agar dapat disesuaikan jadwalnya, sehingga pada hari yang sama mereka dapat bekerja dan belajar.

- Untuk menaikkan rata-rata lama sekolah dengan mengaktifkan kejar paket A, paket B maupun paket C bagi penduduk berusia 25 tahun keatas yang putus sekolah pada jenjang pendidikan setingkat SD, SMTP maupun SMTA.
 - Mewajibkan anak usia sekolah untuk bersekolah sesuai jenjang pendidikannya sehingga angka putus sekolah bisa berkurang dan Harapan Lama Sekolah akan meningkat.
 - Mendekatkan fasilitas pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan SMTP/ sederajat dan SMTA/ sederajat ke masyarakat, khususnya untuk daerah yang sulit/ terpencil sehingga kendala kesulitan geografis dapat teratasi.
3. Perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor dominan yang menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi kurang maksimal agar dapat dibuat kebijakan yang tepat.
 4. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pembangunan manusia maka perlu mengoptimalkan peran komponen masyarakat, misalnya pemuka agama. Kebijakan pembangunan manusia seyogyanya sinergis dengan upaya kesetaraan jender dan pengentasan kemiskinan.
 5. Masih perlu dilakukan langkah-langkah terobosan untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang dapat memperbaiki dan meningkatkan pendapatan rumah tangga di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Membuka lapangan usaha pertanian dan memberdayakan industri kecil merupakan hal yang dapat dilakukan. Kegiatan tersebut

dikembangkan dengan lebih mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.

6. Peningkatan pembangunan di berbagai sektor usaha secara seimbang sesuai potensi yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Mendorong laju investasi baik pemerintah maupun swasta. Dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, upaya pengembangan usaha skala mikro bisa menjadi alternatif pilihan untuk mendongkrak pendapatan masyarakat yang relatif rendah.
7. Kebijakan maupun intervensi yang akan dikembangkan hendaknya memprioritaskan pembangunan ekonomi maupun manusia pada wilayah-wilayah yang relatif tertinggal tanpa mengesampingkan wilayah yang sudah lebih maju (ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan).
8. Semua penyaluran dan pemanfaatan bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan pengawasan sehingga bantuan tersebut dapat berfungsi secara maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tojo Barat	6.370	5.900	12.270	108
2. Tojo	6.931	6.453	13.384	107
3. Ulubongka	8.674	8.076	16.750	107
4. Ampana Tete	12.632	11.614	24.246	109
5. Ampana Kota	9.468	9.164	18.632	103
6. Ratolindo	12.728	12.811	25.539	99
7. Una-Una	4.000	3.897	7.897	103
8. Batudaka	2.790	2.717	5.507	103
9. Togean	5.033	4.726	9.759	106
10. Walea Kepulauan	2.607	2.509	5.116	104
11. Talatako	2.892	2.969	5.861	97
12. Walea Besar	2.190	2.063	4.253	106
Tojo Una-Una	76.315	72.899	149.214	105

Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una

Lampiran 2

Tabel Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tojo Una-Una, 2016

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	8.327	8.202	16.529
5-9	7.821	7.472	15.293
10-14	7.464	7.064	14.528
15-19	6.610	6.155	12.765
20-24	6.225	5.895	12.120
25-29	6.252	6.004	12.256
30-34	6.309	6.084	12.393
35-39	6.095	5.727	11.822
40-44	5.249	5.056	10.305
45-49	4.469	4.057	8.526
50-54	3.612	3.348	6.960
55-59	2.733	2.526	5.259
60-64	1.929	1.845	3.774
65-69	1.296	1.326	2.622
70-74	947	924	1.871
75+	977	1.214	2.191
Jumlah	76.315	72.899	149.214

Sumber : BPS Kabupaten Tojo Una-Una

Lampiran 3

Tabel Angka Harapan Hidup (AHH) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016

Kabupaten/Kota	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Banggai Kepulauan	64,35	64,44
Banggai	69,93	69,97
Morowali	68,06	68,06
Poso	70,09	70,13
Donggala	65,79	65,84
Toli-Toli	63,95	64,03
Buol	66,86	66,93
Parigi Moutong	63,17	63,18
Tojo Una-Una	63,95	64,01
Sigi	68,66	68,69
Banggai Laut	63,48	63,55
Morowali Utara	68,29	68,32
Kodya Palu	69,93	69,93
Sulawesi Tengah	67,26	67,31

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Lampiran 4

Tabel Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016

Kabupaten/Kota	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Banggai Kepulauan	12,71	12,72
Banggai	12,33	12,73
Morowali	12,63	12,75
Poso	13,15	13,16
Donggala	12,42	12,43
Toli-Toli	12,67	12,68
Buol	13,04	13,05
Parigi Moutong	11,84	12,23
Tojo Una-Una	11,31	11,68
Sigi	12,30	12,31
Banggai Laut	12,58	12,85
Morowali Utara	11,69	12,02
Kodya Palu	15,52	15,53
Sulawesi Tengah	12,72	12,92

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Lampiran 5

Tabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016

Kabupaten/Kota	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Banggai Kepulauan	7,73	7,94
Banggai	7,72	7,73
Morowali	8,38	8,49
Poso	8,52	8,67
Donggala	7,81	7,82
Toli-Toli	7,72	7,73
Buol	8,32	8,62
Parigi Moutong	6,72	6,87
Tojo Una-Una	7,65	7,87
Sigi	8,13	8,21
Banggai Laut	7,82	7,94
Morowali Utara	8,15	8,16
Kodya Palu	11,24	11,25
Sulawesi Tengah	7,97	8,12

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Lampiran 6

Tabel Pengeluaran per Kapita Disesuaikan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016

Kabupaten/Kota	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Banggai Kepulauan	7.161	7.286
Banggai	8.895	9.144
Morowali	10.245	10.575
Poso	7.971	8.345
Donggala	7.407	7.802
Toli-Toli	7.156	7.493
Buol	7.475	7.740
Parigi Moutong	9.150	9.351
Tojo Una-Una	7.171	7.361
Sigi	7.376	7.714
Banggai Laut	7.406	7.529
Morowali Utara	8.422	8.594
Kodya Palu	14.545	14.663
Sulawesi Tengah	8.768	9.034

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Lampiran 7

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, 2015-2016

Kabupaten/Kota	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Banggai Kepulauan	62,97	63,45
Banggai	67,44	68,17
Morowali	69,12	69,69
Poso	68,13	68,83
Donggala	63,82	64,42
Toli-Toli	62,72	63,27
Buol	65,61	66,37
Parigi Moutong	62,79	63,60
Tojo Una-Una	61,33	62,27
Sigi	65,35	65,95
Banggai Laut	62,90	63,49
Morowali Utara	66,00	66,57
Kodya Palu	62,97	79,73
Sulawesi Tengah	66,76	67,47

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Lampiran 8

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator Penyusun
IPM Kabupaten Tojo Una-Una, 2013-2017

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPM	60,32	61,15	61,33	62,27	62,83
AHH (tahun)	63,84	63,87	63,95	64,01	64,08
HLS (tahun)	11,10	11,28	11,31	11,68	11,89
RLS (tahun)	7,23	7,62	7,65	7,87	8,00
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Rp. 000)	6.998	7.111	7.171	7.361	7.489

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

*) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Kabupaten Tojo
Una-Una

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA**

